



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025. LAPORAN Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan LKj Tahun 2025 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025.

Tujuan penyusunan laporan kinerja ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKj ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Pangkalpinang, Januari 2026
Kepala Dinas Perindustrian
dan Perdagangan



SUBEKTI SAPUTRA, S.TP., M.M.
NIP. 19830729 200903 1 003

Ikhtisar Eksekutif

Capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian sasaran strategis 1 “Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan”:
 - Diukur dengan indikator sebagai berikut :
 - a. Nilai Lapangan Usaha Industri Pengolahan, Formulasi Perhitungan:
Nilai PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan Tahun (N)
 - Capaian indikator (a.) dimaksud didukung oleh kinerja sebanyak 3 (tiga) Program, yakni Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, Program Pengendalian Izin Usaha Industri, dan Program Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional.
 - Target capaian indikator sasaran tahun 2025 sebesar **22.300** Triliyun Rupiah sampai dengan bulan Desember 2025 terealisasi **24.692** Triliyun Rupiah. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai **110,72%**.
 - Dibandingkan dengan capaian target tahun 2024 sebesar 101,80% terjadi peningkatan sebesar **8,92%**.
2. Capaian sasaran strategis 2 “Meningkatnya Lapangan Usaha Perdagangan”
 - Diukur dengan indikator sebagai berikut :

- a. Nilai Lapangan Usaha Perdagangan, Formulasi Perhitungan : Nilai PDRB Lapangan Usaha Perdagangan Tahun (N)
- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja sebanyak 6 Program, yakni Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan, Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Program Pengembangan Ekspor, Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.
 - Target capaian indikator sasaran tahun 2025 sebesar **16.700** Triliyun Rupiah sampai dengan akhir Bulan Desember 2025 terealisasi **18.286** Triliyun Rupiah. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai **109,49%**.
 - Dibandingkan dengan capaian target tahun 2024 sebesar **102,26%** terjadi peningkatan sebesar **7,23%**.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke depan, sebagai berikut:

1. Percepatan hilirisasi produk-produk dalam RPIP dengan melibatkan stakeholder terkait
2. Peningkatan kolaborasi antar OPD terkait pelaksanaan kegiatan pengawasan dan verifikasi teknis perizinan berusaha
3. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah dan pelaku

usaha distribusi

4. Peningkatan sinergitas dengan pelaku usaha guna menciptakan ketahanan dan ketersediaan bahan pokok
5. Peningkatan pengawasan kepada distributor dan agen-agen agar tidak melakukan penimbunan barang kebutuhan pokok dan barang penting di saat terjadi kelangkaan barang
6. Peningkatan Koordinasi Penyampaian informasi mengenai Laboratorium terakreditasi KAN melalui berbagai media elektronik
7. Meningkatkan peran UPTD BPSMB dalam pengujian CPO.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	2
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	3
DAFTAR ISI.....	5
DAFTAR TABEL.....	6
DAFTAR GAMBAR.....	7
BAB I PENDAHULUAN.....	8
1.1 Cascading Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi.....	9
1.2 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan.....	11
1.3 Isu-isu Strategis.....	12
1.4 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran.....	12
1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2025.....	15
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	16
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD.....	16
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan.....	17
2.3 Struktur Program dan kegiatan 2025.....	17
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	19
2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja.....	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	21
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2025.....	21
3.2. Analisis Ketercapaian Kinerja Tahun 2025.....	26
3.3. Realisasi Anggaran.....	30

BAB IV PENUTUP	32
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	33

Daftar Tabel

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikas Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi 13

Tabel I.2 Sarana-Prasarana 14

Tabel I.3 Perbandingan Anggaran Tahun 2024 dan 2025 15

Tabel II.1 Sasaran Strategis PD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 17

Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan 17

Tabel II.3.1 Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2025 18

Tabel II.3.2 Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2025 18

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Kepala PD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025 19

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

.....
21

Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2025

Tabel III.3 Pengukuran Capaian Sasaran

1

24

Tabel III.4 Target dan Realisasi

Kinerja

25

Tabel III.5 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun

2025

27

Daftar Gambar

Gambar I.1. Cascading Kinerja.....	9
Gambar I.2. Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur PD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	10
Gambar I.3. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada PD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	10
Gambar II.1. Website PD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	10
Gambar II.2. Layanan Pengaduan Melalui Website PD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	10

Bab I berisi :

1. *Pohon Kinerja PD*
2. *Cascading Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi*
3. *Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan*
4. *Isu-Isu Strategis*
5. *Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran*
6. *Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2025*

BAB I

Pendahuluan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau 5APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Gubernur 54 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat ataskinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

1.1 Pohon Kinerja

Pohon kinerja adalah alat bantu bagi organisasi untuk mengawal struktur logika sebab-akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan organisasi dalam menghasilkan outcome yang diinginkan. Menyusun pohon kinerja sebenarnya seperti mengurai rute atau jalur kinerja yang secara logis dianggap paling terkait dan dibutuhkan dalam pencapaian outcome yang diinginkan. Melalui pohon kinerja, instansi pemerintah diharapkan dapat mengenali rute logika yang dapat memandu dalam menemukan strategi dan alternatif solusi baru dalam mencapai kinerja.

Di dalam pohon kinerja kita dapat melihat crosscutingkaitan/hubungan dengan Instansi Lain baik itu instansi vertikal maupun antar perangkat daerah.

Secara teoretis, konsep pohon kinerja mengadopsi konsep model logis (logic model) yang merupakan salah satu pendekatan perencanaan yang sering digunakan untuk menganalisis proses/tahapan logis yang diperlukan dalam mencapai outcome/kinerja yang diinginkan. Pohon Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:



1.2 *Cascading* Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

Setiap Perangkat Daerah (PD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hubungan antara cascading kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:

Gambar I.1 Cascading Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

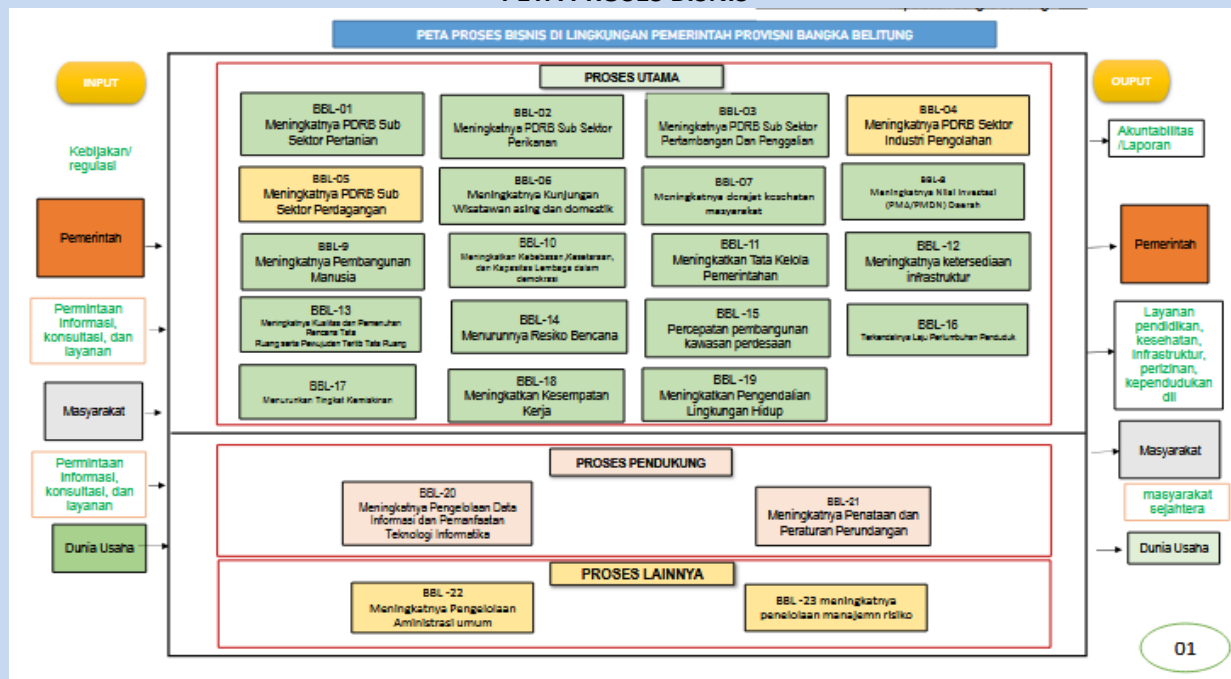
“CASCADING”

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA SELATAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Target Kinerja		
	Satuan	Nilai	Negatif
Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan			
Nilai Lapangan Usaha Industri Pengolahan	22.3	Tilyuan Rpj	0
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri			
Meningkatnya Sinkronisasi dan Keselarasan Perencanaan dan Pembangunan Industri			
Pertumbuhan Unit Usaha Industri	2.8	persen	0
Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi			
Terlaksananya Fasilitas Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi			
Jumlah Sebaran Wilayah Industri	1	Kawasan	0
Koordinasi dan Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri			
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri			
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	15	Dokumen	0
Nilai Investasi Industri Pengolahan Non Migas	5.6	Tilyuan Rpj	0
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri			
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri			
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	8	Dokumen	0
Jumlah Sarana Prasarana Kawasan Industri	1	Kawasan	0
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri			
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri			
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	8	Dokumen	0
Jumlah Tenaga Kerja Industri Pengolahan	5.200	Tenaga Kerja Industri	0
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat			
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat			
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	6	Dokumen	0
Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri			
Terlaksananya Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri			
Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	12	Dokumen	0
Fasilitas Layanan Desain dan Kemas Produk UMMI (UPTD SPK)			
Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi			
Terlaksananya Fasilitas Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi			
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat			
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat			
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (UPTD-IPK)	160	Dokumen	0
Program Pengendalian Iain Usaha Industri			
Meningkatnya Pengendalian Iain Usaha Industri			
Keputusan Iain Usaha Industri (IUI), Iain Perluasan Usaha Industri (IPI), Iain Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Iain Perluasan Kawasan Industri (IPIK) Kawasan Provinsi	70	persen	0
Penerbitan Iain Usaha Industri (IUI), Iain Perluasan Usaha Industri (IPI), Iain Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Iain Perluasan Kawasan Industri (IPIK) Kawasan Provinsi			
Terlaksananya Fasilitas Penerbitan IUI, IPI, IUKI dan IPIK Kawasan Provinsi			
Jumlah Dokumen Penetapan dan Pengendalian Iain Usaha Industri (IUI), Iain Perluasan Usaha Industri (IPI), Iain Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Iain Perluasan Kawasan Industri (IPIK)	1	Dokumen	0
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi			
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri			

Ket : Cascading lengkap dapat dilihat melalui link :

https://drive.google.com/drive/folders/1MGxAg_2b00MlfG0o67L64PyGkSqoTnPB?usp=sharing

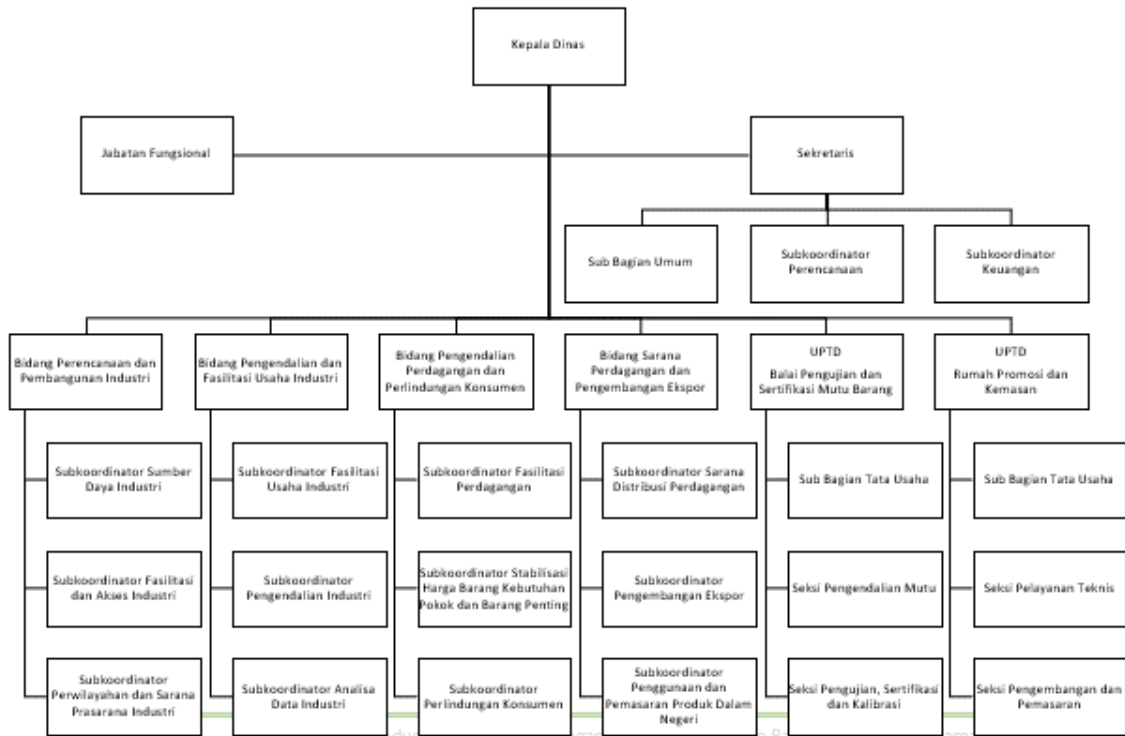
“PETA PROSES BISNIS”



Ket : Peta Proses Bisnis lengkap dapat dilihat melalui link :

https://drive.google.com/drive/folders/1MGxAg_2b00MlfG0o67L64PyGkSqTnPB?usp=sharing

“STRUKTUR ORGANISASI”



Ket : Struktur Organisasi lengkap dapat dilihat melalui link :

https://drive.google.com/drive/folders/1MGxAg_2b00MlfG0o67L64PyGkSqTnPB?usp=sharing

1.3 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan

Dalam upaya mewujudkan kinerja sebagaimana telah dimandatkan dalam RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki tugas dan fungsi yang kemudian menjadi dasar penempatan personil dalam jabatan sebagaimana gambar berikut:

Gambar 1.2.
Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

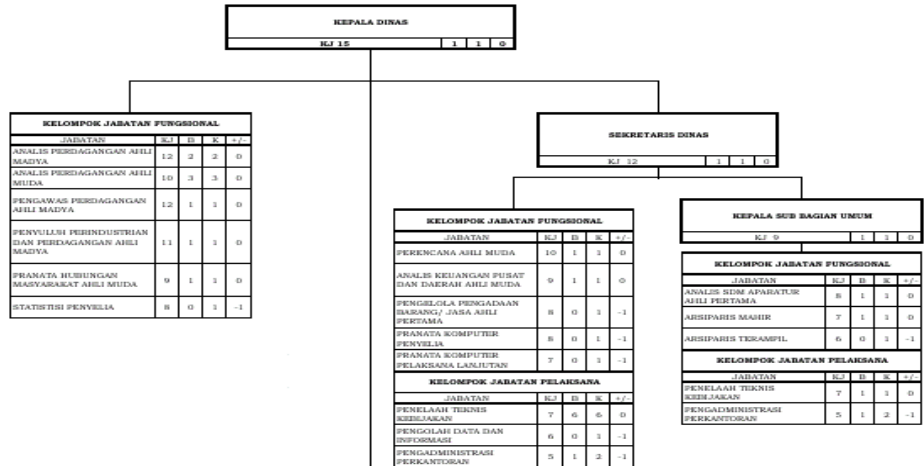
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan Adapun Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung fungsi sebagai berikut:

1. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan Provinsi;
2. penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan Provinsi;
3. penyelenggaraan administrasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
4. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas Perindustrian dan Perdagangan; dan
5. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.



PETA JABATAN

42. PETA JABATAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



Ket : Peta Jabatan lengkap dapat dilihat melalui link :

https://drive.google.com/drive/folders/1MGxAg_2b00MlfG0o67L64PyGkSqoTnPB?usp=shar

1.4 Isu-Isu Strategis (pedoman penyusunan Pohon Kinerja)

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampumenangkap dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu-isu strategis yang melingkupi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai bagian dari Perangkat Daerah yang memiliki tujuan “Meningkatkan pertumbuhan industri pengolahan dan pertumbuhan perdagangan”, antara lain sebagai berikut:

1. Masih rendahnya pertumbuhan industri pengolahan
2. Masih rendahnya pertumbuhan jumlah industri

3. Masih rendahnya kepatuhan perusahaan industri
4. Masih rendahnya pertumbuhan perdagangan
5. Masih rendahnya pertumbuhan ekspor
6. Masih rendahnya Indeks Keberdayaan Konsumen

1.5 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

NO	JABATAN	FORMASI/PETA JABATAN						PEGAWAI YANG ADA						JENIS KELAMIN	
		JUMLAH	KUALIFIKASI					JUMLAH	KUALIFIKASI					LAKI- LAKI	PEREMPUAN
			S3	S2	S1	D3	SMA/SMP		S3	S2	S1	D3	D1/SMA/SMP		
A	JABATAN STRUKUTRAL														
1	Kepala Dinas	1		1				1		1				1	
2	Sekretaris	1			1			1			1			1	
3	Kepala Bidang/UPTD	6		3	3			5		3	2			5	
4	Kepala Subbag/Seksi	7		2	5			7		2	5			4	3
5	Subkoordinator	14		3	11			11		5	6			6	5
B	JABATAN FUNGSIONAL														
1	Penyuluh Perindag	12		1	9	2		9		2	5	2		4	5
2	Analisis Perdagangan	17		2	15			7		2	5			6	1
3	Perencana	1			1			1			1			1	
4	Pranata Humas	1			1			1			1			1	
5	Pengawas Perdagangan	18		2	16			6	1		5			4	2
6	Statistisi	1			1										
7	Pranata Komputer	3				3		1				1			1
8	Arsiparis	2				2		1				1			1

NO	JABATAN	FORMASI/PETA JABATAN						PEGAWAI YANG ADA						JENIS KELAMIN	
		JUMLAH	KUALIFIKASI					JUMLAH	KUALIFIKASI					LAKI- LAKI	PEREMPUAN
			S3	S2	S1	D3	SMA/SMP		S3	S2	S1	D3	D1/SMA/SMP		
9	Analisis Kepegawaian / SDA Aparatur	1			1			1		1				1	
10	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa	1			1										
11	Penguji Mutu Barang	13			2	9	2	7			1	5	1	4	3
12	Calon Instruktur	1			1			1			1				1
C	JABATAN PELAKSANA														
1	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	2			2			2			2			1	1
2	Pengelola Kegiatan dan Anggaran	1				1									
3	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	1					1								
4	Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana	2			2			1			1				1
5	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	3					3	3					3	1	2
6	Pengadministrasi Umum	4					4	3					3	1	2

NO	JABATAN	FORMASI/PETA JABATAN						PEGAWAI YANG ADA						JENIS KELAMIN	
		JUMLAH	KUALIFIKASI					JUMLAH	KUALIFIKASI					LAKI- LAKI	PEREMPUAN
			S3	S2	S1	D3	SMA/SMP		S3	S2	S1	D3	D1/SMA/SMP		
7	Bendahara	6			5	1		6			5	1		1	5
8	Penata Laporan Keuangan	2			2			1			1				1
9	Pengadministrasi Keuangan	1					1	1					1		1
10	Analisis Industri	9			9			6			6			3	3
11	Pengawas Standardisasi Industri	1			1			1			1			1	
12	Pengadministrasi Perizinan	2					2	2					2	2	
13	Pengelola Data Mutu dan Supervisi	1					1								
14	Analisis Standardisasi dan Teknologi	2			2			1			1				1
15	Pengelola Sarana dan Prasarana SDA	1					1	1				1			1
16	Fasilitator Perdagangan	9			9			2			2			1	1
17	Pengelola Distribusi dan Pemasaran	2					2	2				2			2

NO	JABATAN	FORMASI/PETA JABATAN						PEGAWAI YANG ADA					JENIS KELAMIN		
		JUMLAH	KUALIFIKASI					JUMLAH	KUALIFIKASI					LAKI- LAKI	PEREMPUAN
			S3	S2	S1	D3	SMA/SMP		S3	S2	S1	D3	D1/SMA/SMP		
18	Pengawas Usaha Operasi Produksi dan Pemasaran	1			1			1			1			1	
19	Pengelola Pasar	1					1	1				1		1	
20	Pengadministrasi Pengamanan dan Perlindungan Akses Pasar	2					2	2					2	2	
21	Pengelola Fasilitas dan Mediasi Perlindungan Konsumen	1					1								
22	Analisis Kimia	1			1			1				1		1	
23	Teknisi Laboratorium	1					1								
24	Pengelola Sertifikasi	1					1	1				1			1
25	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	2			2										
26	Pengelola Kepegawaian	2					2	1				1		1	
27	Analisis Mutu Produk	1			1			1			1				1

NO	JABATAN	FORMASI/PETA JABATAN						PEGAWAI YANG ADA					JENIS KELAMIN		
		JUMLAH	KUALIFIKASI					JUMLAH	KUALIFIKASI					LAKI- LAKI	PEREMPUAN
			S3	S2	S1	D3	SMA/SMP		S3	S2	S1	D3	D1/SMA/SMP		
28	Analisis Standar Mutu Bahan dan Peralatan	1			1			1			1				1
29	Analisis Proses Akreditasi Laboratorium	1			1			1		1				1	
30	Perancang Grafis	3			3			1			1			1	
31	Pengelola Gudang	1					1	1				1			1
32	Operator Mesin	2					2								
33	Penelaah Pengembangan Usaha	1			1			1			1			1	
34	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	1			1			1			1				1
35	Pegawai Tugas Belajar							1			1			1	
D	PPPK														
1	Pengawas Perdagangan							2			2			2	
E	Pegawai Tenaga Kontrak														
1	Tenaga Pelayanan Umum							40		1	16	2	21	20	20
2	Tenaga Kebersihan							4			1		3	2	2

NO	JABATAN	FORMASI/PETA JABATAN						PEGAWAI YANG ADA					JENIS KELAMIN		
		JUMLAH	KUALIFIKASI					JUMLAH	KUALIFIKASI					LAKI- LAKI	PEREMPUAN
			S3	S2	S1	D3	SMA/SMP		S3	S2	S1	D3	D1/SMA/SMP		
3	Tenaga Keamanan							3					3	3	
4	Tenaga Supir							2					2	2	
JUMLAH		172	0	14	112	29	17	158	1	18	78	20	41	88	70

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 78 orang (49.37%), disusul oleh jenjang pendidikan D1/SLTA/SLTP sebanyak 41 orang (25.95%), D3 sebanyak 20 orang (12.66%), S2 sebanyak 18 orang (11.39%), dan S3 sebanyak 1 orang (0.63%). Komposisi pegawai laki-laki sedikit lebih banyak dibanding pegawai perempuan; bahkan untuk jabatan struktural pun lebih banyak dijabat laki-laki (8 orang). Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Tabel I.2 Sarana-Prasarana

No.	Klasifikasi	Jumlah Barang	NilaiAset*
1	Tanah		
	tanah	4	713.236.606,00
2	Peralatan dan mesin	1.948	18.064.140.081,50
	alat besar	4	857.865.000,00
	alat angkutan	15	1.784.984.200
	alat bengkel dan alat ukur	100	1.195.379.430,00
	alat pertanian	73	191.461.500,00
	alat kantor dan rumah tangga	1.037	2.366.273.988,00
	alat studio, komunikasi dan pemancar	33	1.739.274.847,00
	alat kedokteran dan kesehatan	2	17.223.800,00
	alat Iaboratorium	498	8.243.926.492,50
	alat persenjataan	0	0,00
	komputer	186	1.715.300.824,00
	alat eksplorasi	0,00	0,00
	alat pengeboran	0,00	0,00
	alat produksi, pengolahan dan pemurnian	0,00	0,00
	alat bantu eksplorasi	0,00	0,00
	alat keselamatan kerja	0,00	0,00
	alat peraga	0,00	0,00

No.	Klasifikasi	Jumlah Barang	NilaiAset*
	peralatan proses/produksi	0,00	0,00
	rambu-rambu	0,00	0,00
	peralatan olah raga	0,00	0,00
3	Gedung dan bangunan	36	5.719.50.296,82
	bangunan gedung	35	5.695.798.296,82
	monumen	1	23.710.000,00
	bangunan menara		0,00
	tugu titik kontrol/pasti		0,00
4	Jalan, irigasi dan jaringan	3	227.226.000,00
	jalan dan jembatan		0,00
	bangunan air	1	40.826.000,00
	instalasi	1	166.400.000,00
	jaringan	1	20.000.000,00
5	Aset tetap lainnya	5	450.000,00
	bahan perpustakaan	5	450.000,00
	barang bercorak kesenian/ kebudayaan/ olahraga		0,00
	hewan		0,00
	biota perairan		0,00
	tanaman		0,00
	barang koleksi non budaya		0,00
	aset tetap dalam renovasi		0,00
6	Konstruksi dalam pengerjaan		0,00
	konstruksi dalam pengerjaan		0,00
7	dll.		
	Total		24.724.560.984,32

Kendaraan operasional 15 unit (PD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari yakni 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan, 5 (lima) unit kendaraan operasional roda empat , 9 (sembilan) unit kendaraan roda dua. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang pengelola keuangan, ruang arsip, ruang mushola, ruang baca, ruang gudang, ruang tunggu, ruang laktasi,

dan toilet*). Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain*) sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio personal komputer/ laptop dibanding jumlah pegawai mendekati 110:186 Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana sudah *) memadai. Hanya saja sebanyak 10 % dari komputer/ laptop yang ada diproduksi Tahun 2000an awal yang spesifikasinya sudah jauh tertinggal dengan kondisi saat ini sehingga tidak/mendukung*) tuntutan pekerjaan yang 90 % berbasis IT.

Tabel I.3 Perbandingan Anggaran Tahun 2024 dan 2025

Tahun	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah
2024	Rp 22.902.422.900	Rp 175.185.664	Rp -	Rp -	Rp 23.077.608.564
2025	Rp 21.020.743.378	Rp 17.800.300	Rp -	Rp -	Rp 21.038.543.678

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Terlihat pada tabel I.3, untuk tahun 2024 dibanding tahun 2023 terdapat penurunan Total anggaran belanja sebesar Rp 17.125.120.293. Hal ini menunjukkan ada kendala refokusing dan pengurangan anggaran belanja untuk membiayai program/kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB 2

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bab 2 Berisi :

1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD
2. Strategi dan Arah Kebijakan
3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025
4. Indikator Kinerja Utama (IKU)
5. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
6. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja PD

Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan penjabaran operasional RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2023 – 2026. Renstra ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026.

2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Sesuai *cascade* kinerja, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah meningkatnya Ekonomi Daerah. Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama lima tahun adalah :

1. Meningkatkan PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan
2. Meningkatkan PDRB Lapangan Usaha Perdagangan

Adapun sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam waktu lima tahun sebagai berikut:

Tabel II.1 Sasaran Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan., 2023-2026)

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Baseline 2022	TARGET TAHUNAN				Target Akhir Renstra	Ket
					2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan	Nilai Lapangan Usaha Industri Pengolahan	Triliyun Rupiah	14,500	15,250	16,000	16,750	17,500	17,500	Awal
						21,750	22,150	22,200	22,200	Revisi
2.	Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Perdagangan	Nilai Lapangan Usaha Perdagangan	Triliyun Rupiah	11,750	12,250	12,900	13,550	14,200	14,200	Awal
						16,150	16,550	16,600	16,600	Revisi

2.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan	Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Serta Pembinaan Hubungan Industri dan Kesehatan Kerja	Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Serta Pembinaan Hubungan Industri dan Kesehatan Kerja
2.	Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Perdagangan	Peningkatan Produktifitas, Kualitas dan Daya Saing Produk Perdagangan	Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Produk

2.3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025 maupun program dan kegiatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.3 Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung
Pencapaian Sasaran Tahun 2025

Sasaran	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Bertambah /Berkurang (RP)
1. Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan		1.140.982.400	733.718.300	-407.264.100
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1.007.989.950	670.610.850	-337.379.100
	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	791.999.350	464.684.550	-327.314.800
	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPK)	215.990.600	205.926.300	-10.064.300
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	95.999.950	43.725.500	-52.274.450
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	95.999.950	43.725.500	-52.274.450
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	36.992.500	19.381.950	-17.610.550
	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	36.992.500	19.381.950	-17.610.550

Sasaran	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Bertambah /Berkurang (RP)
2. Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Perdagangan		1.012.121.843	690.138.993	-321.982.850
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	26.989.950	11.120.500	-15.869.450
	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor	4.995.600	0	-4.995.600
	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	4.999.800	0	-4.999.800
	Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	9.995.750	4.121.700	-5.874.050
	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	6.998.800	6.998.800	0
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	48.889.600	27.014.500	-21.875.100
	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi Serta Lelang Komoditas	48.889.600	27.014.500	-21.875.100
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	108.309.000	66.158.200	-42.150.800
	Menjamin Ketersediaan	21.309.450	10.246.850	-11.062600

Sasaran	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Bertambah /Berkurang (RP)
	Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi			
	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten / Kota yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	65.999.850	45.760.750	-20.239.100
	Pengawasan Pupuk dan Peptisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	20.999.700	10.150.600	-10.849.100
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	26.999.650	15.051.700	-11.947.950
	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada Lebih Dari 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam Provinsi	26.999.650	15.051.700	-11.947.950
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	692.944.693	493.921.893	-199.022.800
	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/ Kota	380.999.800	209.580.000	-171.419.800
	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah (BPSMB)	284.945.343	269.717.743	-15.227.600
	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	26.999.550	14.624.150	-12.375.400
	PROGRAM PENGGUNAAN	107.988.950	76.872.200	-31.116.750

Sasaran	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Bertambah /Berkurang (Rp)
	DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			
	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	27.999.850	21.819.250	-6.180.600
	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri (RPK)	0	0	0
	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	10.999.400	8.434.050	-2.565.350
	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri (RPK)	0	0	0
	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	16.989.700	8.466.700	-8.523.000
	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (RPK)	52.000.000	38.152.200	-13.847.800
	Total Anggaran yang Berkaitan Langsung dengan Pencapaian Sasaran	2.153.104.243	1.423.857.293	(729.246.950)

2.4. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RENSTRA Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/PD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator keluaran (Output) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis. Dokumen Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibuat dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/053/SK/DISPERINDAG/2025 (sebagaimana terlampir).

Sedangkan Indikator Kinerja Individu (IKI) adalah tingkat pencapaian atau hasil kerja seseorang dari sasaran tujuan yang harus dicapai organisasi dalam kurun waktu tertentu. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Individu sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPD dan RENSTRA Perangkat Daerah.

2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikatorkinerjanya.

2.5.1 Perjanjian Kinerja 2025 (Induk)

Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025 yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target TW
1.	Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan	Nilai Lapangan Usaha Industri Pengolahan	Triliyun Rupiah	16,750	Triwulan I	4,000
					Triwulan II	8,000
					Triwulan III	12,500
					Triwulan IV	16,750
2.	Meningkatnya Lapangan Usaha Perdagangan	Nilai Lapangan Usaha Perdagangan	Triliyun Rupiah	13,550	Triwulan I	3,500
					Triwulan II	6,500
					Triwulan III	9,7005
					Triwulan IV	13,550

Tabel II.5 Komponen Anggaran Induk pada Perjanjian Kinerja
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025

No.	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Ket
1.	Nilai Lapangan Usaha Industri Pengolahan	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	791.999.350	APBD
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri (UPTD. RPK)	215.990.600	APBD
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri	95.999.950	APBD
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	36.992.500	APBD
2.	Nilai Lapangan Usaha Perdagangan	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	26.989.950	APBD
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	48.889.600	APBD
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	108.309.000	APBD
		Program Pengembangan Ekspor	26.999.650	APBD
		Program Standardisasi Dan	407.999.350	APBD

No.	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Ket
		Perlindungan Konsumen		
		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen (UPTD. BPSMB)	284.945.343	APBD
		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	55.988.950	APBD
		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (UPTD. RPK)	52.000.000	APBD
	Anggaran Penunjang	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	21.307.025.413	APBD
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (UPTD. BPSMB)	182.704.732	APBD
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (UPTD. RPK)	186.912.400	APBD
	Anggaran Pendukung	Program Perdagangan Dalam Negeri	275.351.000	APBN
		Program Perdagangan Luar Negeri	0	APBN
		Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	786.111.000	APBN

2.5.2 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Perubahan Kesatu)

Pada tahun 2025, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025 melaksanakan reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Reviu dilakukan karena dengan dikeluarkannya Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024, melalui Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor : B/191/AA.05/2024 tanggal 3 September 2024 yaitu “ agar memenuhi melakukan perbaikan indikator kinerja

menggunakan informasi capaian kinerja pada laporan kinerja sebagai dasar penentuan Target tahun selanjutnya, penyesuaian aktivitas strategi untuk mencapai kinerja, dan kebutuhan anggarannya”, sehingga perlu melakukan penyesuaian pada kolom sasaran dan indikator kinerja. Sesuai dengan Berita Acara Perubahan Perjanjian Kinerja (Kesatu) Tahun 2025 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Nomor : Perjanjian Kinerja Perubahan adalah sebagai berikut :

Tabel II.6 Perjanjian Kinerja Perubahan Kesatu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target TW
1.	Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan	Nilai Lapangan Usaha Industri Pengolahan	Triliyun Rupiah	22,300	Triwulan I	4,000
					Triwulan II	8,000
					Triwulan III	16,500
					Triwulan IV	22,150
2.	Meningkatnya Lapangan Usaha Perdagangan	Nilai Lapangan Usaha Perdagangan	Triliyun Rupiah	16,700	Triwulan I	3,500
					Triwulan II	6,500
					Triwulan III	12,700
					Triwulan IV	16,550

Tabel II.7 Komponen Anggaran Induk pada Perjanjian Kinerja Perubahan Kesatu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025

No.	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Ket
1.	Nilai Lapangan Usaha Industri Pengolahan	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	592.506.350	APBD
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri (UPTD. RPK)	205.926.300	APBD
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri	54.225.500	APBD
		Program Pengelolaan Sistem	22.214.850	APBD

No.	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Ket
		Informasi Industri Nasional		
2.	Nilai Lapangan Usaha Perdagangan	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	11.994.600	APBD
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	33.371.900	APBD
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	75.371.850	APBD
		Program Pengembangan Ekspor	15.051.800	APBD
		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	270.855.950	APBD
		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen (UPTD. BPSMB)	269.717.743	APBD
		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	40.680.950	APBD
		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (UPTD. RPK)	39.235.100	APBD
	Anggaran Penunjang	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	20.915.694.628	APBD
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (UPTD. BPSMB)	157.076.285	APBD
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (UPTD. RPK)	168.496.700	APBD
	Anggaran Pendukung	Program Perdagangan Dalam Negeri	275.351.000	APBN
		Program Perdagangan Luar Negeri	0	APBN
		Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	786.111.000	APBN

2.5.3 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Perubahan Kedua)

Pada tahun 2025, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025 melaksanakan reviu Perjanjian

Kinerja Tahun 2025. Reviu dilakukan karena adanya *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran serta telah ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2025, sehingga perlu melakukan penyesuaian pada kolom Anggaran pada lampiran Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Sesuai dengan Berita Acara Perubahan Perjanjian Kinerja (Kedua) Tahun 2025 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Nomor : Perjanjian Kinerja Perubahan adalah sebagai berikut :

Tabel II.8 Perjanjian Kinerja Perubahan Kedua
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target TW
1.	Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan	Nilai Lapangan Usaha Industri Pengolahan	Triliyun Rupiah	22,300	Triwulan I	4,000
					Triwulan II	8,000
					Triwulan III	16,500
					Triwulan IV	22,150
2.	Meningkatnya Lapangan Usaha Perdagangan	Nilai Lapangan Usaha Perdagangan	Triliyun Rupiah	16,700	Triwulan I	3,500
					Triwulan II	6,500
					Triwulan III	12,700
					Triwulan IV	16,550

Tabel II.9 Komponen Perubahan Anggaran pada Perjanjian Kinerja Perubahan Kedua
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
tahun 2025

No.	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Ket
1.	Nilai Lapangan Usaha Industri Pengolahan	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	464.684.550	APBD
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri (UPTD. RPK)	205.926.300	APBD
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri	43.725.500	APBD

No.	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Ket
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	19.381.950	APBD
2.	Nilai Lapangan Usaha Perdagangan	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	11.120.500	APBD
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	27.014.500	APBD
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	66.158.200	APBD
		Program Pengembangan Ekspor	15.051.700	APBD
		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	224.204.150	APBD
		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen (UPTD. BPSMB)	269.717.743	APBD
		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	38.720.000	APBD
		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (UPTD. RPK)	38.152.200	APBD
	Anggaran Penunjang	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	19.322.193.105	APBD
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (UPTD. BPSMB)	128.496.580	APBD
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (UPTD. RPK)	163.996.700	APBD
	Anggaran Pendukung	Program Perdagangan Dalam Negeri	275.351.000	APBN
		Program Perdagangan Luar Negeri	0	APBN
		Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	786.111.000	APBN

Keterangan Tambahan:

1. tetapi anggaran berkurang/~~bertambah~~ 13,24% sehubungan adanya *refocusing*.
2. Data capaian kinerja tersedia pada Triwulan IV.
3. Mengelola anggaran Tugas Pembantuan, yaitu:
 - 3.1. Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri: Rp 275.351.000
 - 3.2. Program Pengembangan Perdagangan Luar Negeri: Rp 0
 - 3.3. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Rp 786.111.000

2.6. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja Tahun 2025

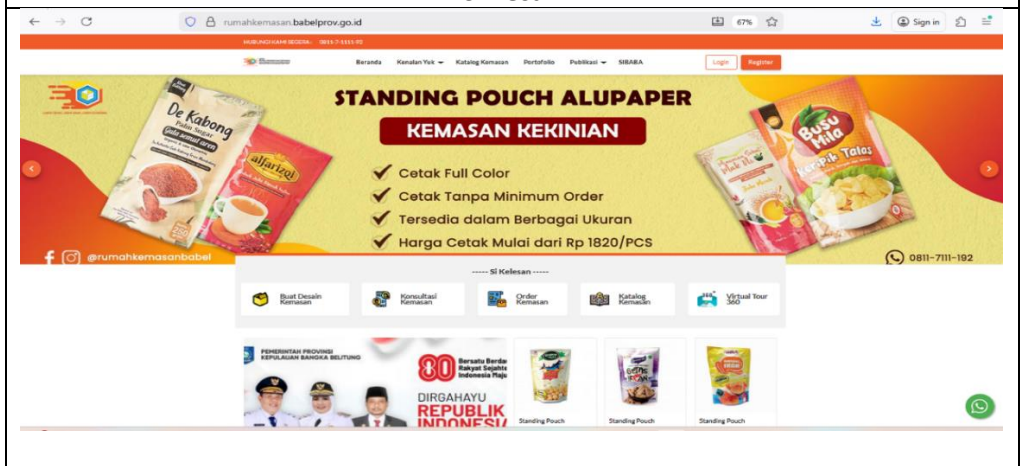
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki website resmi yang dapat diakses, baik oleh pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun masyarakat umum dengan alamat <https://perindag.babelprov.go.id> Di dalam website ini memuat profil lengkap beserta tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain itu juga ditampilkan beberapa kegiatan terbaru yang telah dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ada juga menu untuk pengaduan, pelayanan masyarakat, dan prosedur pelayanan masyarakat yang dilakukan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, seperti SiKlesan layanan melayani konsultasi, desain, produksi cetak, promosi dan edukasi dan Layanan Pengaduan Konsumen melalui Whatsapp, Instagram dan Facebook.

Gambar II.2. Website Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Screenshot website <https://perindag.babelprov.go.id>



Screenshot website <https://rumahkemasan.babelprov.go.id/> dan Aplikasi Siklesan



Layanan Pengaduan Konsumen



BAB 3

Akuntabilitas Kinerja

Bab 3 Berisi :

1. *Capaian Kinerja Tahun 2025*
2. *Efisiensi Anggaran*
3. *Inovasi*
4. *Penghargaan*
5. *Lintas Sektor/Crosscutting*

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2025

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Bapak Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kriteria Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

❖ *Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017*

Tabel III.2. Capaian Kinerja Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/METAINDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2022	CAPAIAN 2024	TAHUN 2025				TARGETAKHIR RENSTRA
						TARGET	REALISASI	PERSENTASE	KRITERIA / KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan	Nilai Lapangan Usaha Industri Pengolahan	Triliyun Rupiah	14,500	22,142	22,300	24,692	110,72%	Sangat Baik	22,500
		<u>Formula Perhitungan:</u> Nilai PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan Tahun (N)								
2.	Meningkatnya Lapangan Usaha Perdagangan	Nilai Lapangan Usaha Perdagangan	Triliyun Rupiah	11,750	16,515	16,700	18,286	109,50%	Sangat Baik	17,000
		<u>Formula Perhitungan:</u> Nilai PDRB Lapangan Usaha Perdagangan Tahun (N)								

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan IV-2025
BRS No. 12/02/19/Th. XXIV, 5 Februari 2026

Adapun analisis capaian kinerja sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

3.1.1. Sasaran : Meningkatkan PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan

Kinerja sasaran Meningkatkan PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan diukur dengan indikator Nilai Lapangan Usaha Industri Pengolahan, Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.3. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
1.	Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan	Nilai Lapangan Usaha Industri Pengolahan	Formula Perhitungan: Nilai PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan Tahun (N) Diambil dari SK IKU PD

Kinerja sasaran Meningkatkan PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan diukur dengan menggunakan formulasi perhitungan Nilai PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan Tahun (N) Tahun 2025 capaian kinerja sasaran ini adalah **24,692** Triliyun Rupiah atau sebesar **110,72%** dari target 22,300 Triliyun Rupiah. Sumber data diolah dari hasil perhitungan atas kinerja masing-masing program pendukung sasaran Perangkat Daerah.

Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada tahun 2025 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III.4. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

No	IndikatorSasaran	2024			2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2024 terhadap target 2026(%)
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1.	Nilai Lapangan Usaha Industri Pengolahan	21,750	22,142	101,80%	22,300	24,692	110,72%	22,500	109,74%
----	--	--------	--------	---------	--------	--------	---------	--------	---------

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan IV-2025
BRS No. 12/02/19/Th. XXIV, 5 Februari 2026

Analisis Ketercapaian Sasaran Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan adalah sebagai berikut:

- a. Tercapai 24,692 (kolom 7), dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 110,72 % (kolom 8) terlampaui.
- b. Dibandingkan persentase capaian tahun lalu sebesar 101,80% (data Lkj Tahun lalu) indikator sasaran Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan mengalami peningkatan sebesar 8,92% (capaian tahun ini dikurang % capaian tahun lalu)
- c. Dibandingkan dengan target akhir RENSTRA, diproyeksikan sasaran akan berhasil tercapai.

Keberhasilan capaian Indikator Persentase peningkatan capaian tersebut didukung dari program-program sebagai berikut :

1. **Program perencanaan dan pembangunan industri** dengan sasaran program Meningkatnya Sinkronisasi dan Keselarasan Perencanaan dan Pembangunan Industri mempunyai Indikator Pertumbuhan Unit Usaha Industri formula perhitungan indikator ini adalah
 - a. $(\text{Jumlah Usaha Industri}(N) - \text{Jumlah Usaha Industri}(N-1)) \div (\text{Jumlah Usaha Industri}(N-1)) \times 100\%$. Capaian indikator kinerja ini adalah $(24.374 - 23.479 / 23.479) \times 100\% = 3,8\%$ (contoh perhitungan persentase capaian program) dari target sebesar 2,75%. Capaian kinerja pada Tahun 2025 ini lebih tinggi dibandingkan pada Tahun 2024 yang sebesar 2,501% (capaian tahun lalu).

- b. (Jumlah desain dan cetak kemasan Produk UMKM yang terfasilitasi (N)) dibagi Jumlah Produk UMKM yang mengajukan fasilitas (N) dikali 100%. Capaian indikator kinerja ini adalah $((196 + 530)/726) \times 100\% = 100\%$ (contoh perhitungan persentase capaian program) dari target sebesar 70,00% atau sebesar $(100,00\%/70,00\%) = 142,86\%$. Capaian kinerja pada Tahun 2025 ini lebih rendah dibandingkan pada Tahun 2024 yang sebesar 166,67% (capaian tahun lalu).

Target indikator program ini **dapat tercapai** didukung oleh faktor berikut :

- Regulasi yang mempermudah perizinan usaha industri (OSS, NIB, kemudahan IUI)
- Pendampingan legalitas usaha (NIB, PIRT, HKI)
- Fasilitasi promosi dan pameran produk industri.
- Adanya kebijakan pusat dan daerah yang mendukung pengembangan industri kecil dan menengah (IKM),
- Tersedianya peralatan desain dan produksi kemasan (mesin cetak, desain grafis, alat finishing),
- Kejelasan tugas dan fungsi UPTD Rumah Promosi dan Kemasan dalam Perencanaan dan Pembangunan Industri.

Target indikator program ini **tidak tercapai** disebabkan kendala sebagai berikut :

- Data unit usaha industri belum sepenuhnya akurat dan terbaru.
- Masih adanya unit usaha yang belum terdaftar/berizin.
- Perbedaan data antar instansi (kab/kota, provinsi).
- Keterbatasan Akses Pasar dan Daya Saing
- Belum optimalnya penyebaran informasi tentang pemanfaatan fasilitas

layanan promosi dan kemasan di Kab/Kota;

- Keterbatasan teknologi mesin dan peralatan serta keterbatasan kemampuan sumberdaya manusia yang dimiliki dalam memberikan pelayanan kepada para pelaku IKM;
- Belum adanya dukungan intervensi secara regulasi untuk mengarahkan pemanfaatan layanan kemasan;
- Keterbatasan jumlah SDM dan kemampuan operator mesin / tenaga desain;
- Fluktuasi harga bahan baku serta tempat penyimpanan bahan baku

Upaya Perbaikan kedepan adalah sebagai berikut :

- Pemutakhiran dan Validasi Data Unit Usaha Industri
- Peningkatan Legalitas dan Kepatuhan Perizinan Usaha (NIB, PIRT, HKI)
- Sinergitas dan sinkronisasi data antar Kabupaten/Kota dan Provinsi.
- Peningkatan Akses Pasar dan Daya Saing Produk
- Upgrading skill Sumber Daya Manusia dalam pemanfaatan Sumber Daya Mesin dan Peralatan yang dimiliki,
- Memberikan pembekalan dalam rangka memaksimalkan kemampuan tenaga operator/desain dalam mengoperasikan mesin dan peralatan;
- Perlunya intervensi regulasi yang sifatnya himbauan dalam rangka pemanfaatan layanan kemasan secara maksimal;
- penyediaan tempat yang representatif untuk penyimpanan barang (bahan baku-barang jadi).

2. **Program pengendalian izin usaha industri** dengan sasaran program Meningkatnya Pengendalian Izin Usaha Industri mempunyai Indikator

Kepatuhan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah Kepatuhan Perusahaan Industri dan Kawasan Industri Yang Diawasi dan Dikendalikan (N) dibagi Jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang diawasi dan dikendalikan (N) dikali 100%. Capaian indikator kinerja adalah $(12/12) \times 100\% = 100\%$ (contoh perhitungan persentase capaian program) dari target sebesar 70%. Capaian kinerja pada Tahun 2025 ini lebih tinggi dibandingkan pada Tahun 2024 yang sebesar 0% (capaian tahun lalu) karena tidak dilaksanakan dikarenakan program tidak ada anggarannya (Tidak masuk dalam RKPD Tahun 2024).

Target indikator program ini **dapat tercapai** didukung oleh faktor berikut :

- Tingkat Responsif dari Perusahaan Industri atas kewajibannya dalam pemenuhan dokumen perizinan berusaha sangat baik
- Langkah persuasif Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam fasilitasi pendampingan pemenuhan kewajiban perusahaan industri, pelaksanaan sosialisasi
- Peran Aktif petugas Tim pengawasan yang melakukan koordinasi dengan perusahaan industri

3. **Program pengelolaan sistem informasi industri nasional** dengan sasaran program Meningkatnya Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional mempunyai Indikator Persentase Kepatuhan Perusahaan Industri dan Kawasan Industri pada Akun SIINas formula perhitungan indikator ini adalah $(\text{Jumlah Laporan Perusahaan Industri dan Kawasan Industri di SIINas}(N))$ dibagi $(\text{Jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang terdaftar di SIINas}(N))$

dikali 100%. Capaian indikator kinerja adalah $(70/90) \times 100\% = 77,77\%$ (contoh perhitungan persentase capaian program) dari target sebesar 90%. Capaian kinerja pada Tahun 2025 ini lebih tinggi dibandingkan pada Tahun 2024 yang sebesar 61,54% (capaian tahun lalu).

Target indikator program ini **dapat tercapai** didukung oleh faktor berikut :

- Pelaksanaan Sosialisasi/Diseminasi SIINas secara berkelanjutan
- Pelaksanaan Bimtek SIINas
- Kolaborasi dengan Dinas Kabupaten/Kota

Target indikator program ini **tidak tercapai** disebabkan kendala sebagai berikut:

- Bergantinya admin pemegang akun SIINas pada perusahaan industri maupun perusahaan Kawasan industri yang tidak diikuti dengan *sharing knowledge* pada admin pengganti tersebut.
- Kurangnya komitmen pimpinan perusahaan untuk menyampaikan datanya melalui SIINas
- Ketakutan perusahaan akan kerahasiaan data yang dilaporkan
- Tidak ada mekanisme jelas dalam aturan baik dari undang-undang maupun permenperin terkait reward and punishment dalam penyampaian pelaporan data industri di SIINas
- Keterbatasan anggaran

Upaya Perbaikan kedepan adalah sebagai berikut :

- Penguatan fasilitasi asistensi SIINas bagi pelaku Industri yang tidak patuh.
- Penguatan aturan hukum yang jelas terkait reward and punishment bagi pelaku industri dalam pelaporan data di SIINas
- Anggaran yang mendukung kinerja kegiatan

Tabel III.5. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja PD dengan Nasional Tahun 2025

No.	Indikator dan Formula Perhitungan	Target (Nasional)	Target (PD)	Realisasi (Nasional)	Realisasi (PD)	Capaian (Nasional)	Capaian (PD)
1.	Nilai Lapangan Usaha Industri Pengolahan	*	22,300	4.541,5	24,692	*	110,72%
	Formula Perhitungan: Nilai PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan Tahun (N)						

- a. Jika dibandingkan dengan target Nasional, Target indikator Nilai Lapangan Usaha Industri Pengolahan berada sebagai bagian dari Target Nasional.
- b. Jika dibandingkan dengan Realisasi Nasional Target indikator Nilai Lapangan Usaha Industri Pengolahan berada sebagai bagian dari Realisasi Nasional.
- c. Sebagai kesimpulan capaian indikator Nilai Lapangan Usaha Industri Pengolahan berada mendukung capaian Nasional yaitu sebesar 0,544 % $(24,692/4.541,5)*100\%$

3..1.1. Data Dukung Capaian Meningkatnya Nilai Lapangan Usaha Industri Pengolahan

- Program Perencanaan dan Pembangunan Industri melekat pada Bidang Perencanaan dan Pembangunan Industri kegiatan sebagai berikut, yaitu :
 - a. Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi dengan anggaran sebesar Rp464.684.550,00
- Program Perencanaan dan Pembangunan Industri melekat pada UPTD Rumah Promosi dan Kemesan kegiatan sebagai berikut, yaitu :

- a. Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi dengan anggaran sebesar Rp205.926.300,00

Gambar III.1

Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi


No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1.		<p>Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat : Pameran INACRAFT Tahun 2025 di Jakarta Convention Center (JCC) tanggal 05 s.d. 09 Februari 2025.</p>
2.		<p>Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat : Pameran HUT DEKRANAS ke-45 di Balikpapan, Kalimantan Timur tanggal 09 s.d. 11 Juli 2025</p>






3. Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat : Pameran INACRAFT "Oktober" Tahun 2025 di Jakarta Convention Center (JCC) tanggal 01 s.d. 05 Oktober 2025.

Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPK)

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1.		- Proses kardus
2.		- Proses Cetak Digital

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
3.		- Proses pond dan laminasi
4.		- Kemasan yang di Produksi
5.		- Desain on the Spot

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
6.		- Desain di Kantor UPT RPK
7.		- Kunjungan SMKN 1 Air Gegas
8.		- Proses Kemasan
9.		- Proses Cetak



No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
10.		- Bahan Baku Kardus
11.		- Proses Cetak Kemasan

- Program Pengendalian Izin Usaha Industri melekat pada Bidang Pengendalian dan Fasilitasi Usaha Industri kegiatan sebagai berikut, yaitu :
 - a. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi dengan anggaran sebesar Rp 43.725.500,00

Gambar III.2
 Program Pengendalian Izin Usaha Industri
 Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin
 Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan
 Provinsi

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi		
1.		PT. Bumi Permai Lestari
2.		PT. Gunung Maras Lestari


3.		PT. Mitra Stania Prima
<p>Sub Kegiatan Fasilitas verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)</p>		
4.		<p>Verifikasi Teknis PT. Mentari Sawit Makmur 20 Mei 2025</p>
5.		<p>Verifikasi Teknis PT. Membalong Silika Indonesia 24 Juni 2025</p>

6.		<p>Verifikasi Teknis PT. Timah Nusantara 3 September 2025</p>
7.		<p>Verifikasi Teknis PT. Bhumi Palmindo Kencana 1 Oktober 2025</p>
8.		<p>Verifikasi Teknis PT. Putraprima Mineral Mandiri 10 Oktober 2025</p>



- Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional melekat pada Bidang Pengendalian dan Fasilitas Usaha Industri kegiatan sebagai berikut, yaitu :
 - a. Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) dengan anggaran sebesar Rp 19.381.950,00

Gambar III.3
 Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
 Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi
 Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1.		Bimtek SIINas melalui Zoom Meeting tanggal 25 Juni 2026

2.	<p>Pengampaian Narasumber (M. Ari Kurnia Tuafik, SE., M.Inft)</p> 	Diseminasi SIINas melalui Zoom Meeting tanggal 03 September 2025
3.	 <p>Tangkapan layar Statistik Singkat SIINas Bangka Belitung (1.684 perusahaan industri)</p>	Pelaksanaan Pengumpulan dan Pengolahan Data Industri melalui SIINas Tahun 2025

3.1.1. Sasaran 2: Meningkatnya Lapangan Usaha Perdagangan

Kinerja sasaran Meningkatnya Lapangan Usaha Perdagangan diukur dengan indikator Nilai Lapangan Usaha Perdagangan. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.3. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
2.	Meningkatnya Lapangan Usaha Perdagangan	Nilai Lapangan Usaha Perdagangan	<p><u>Formula Perhitungan:</u> Nilai PDRB Lapangan Usaha Perdagangan Tahun (N)</p> <p>Diambil dari SK IKU PD</p>

Kinerja sasaran Meningkatnya Lapangan Usaha Perdagangan diukur dengan menggunakan formulasi perhitungan Nilai PDRB Lapangan Usaha Perdagangan Tahun (N) Tahun 2025 capaian kinerja sasaran ini adalah **18,286** Triliyun Rupiah atau sebesar **109,50%** dari target 16,750 Triliyun Rupiah. Sumber data diolah dari hasil perhitungan atas kinerja masing-masing program pendukung sasaran Perangkat Daerah.

Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada tahun 2025 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III.4. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

No	IndikatorSasaran	2024			2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2024 terhadap target 2026(%)
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	Nilai Lapangan Usaha Perdagangan	16,150	16,515	102,26%	16,750	18,286	109,50%	17,000	107,56%

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan IV-2025
BRS No. 12/02/19/Th. XXIV, 5 Februari 2026

Analisis Ketercapaian Sasaran Meningkatnya Lapangan Usaha Perdagangan adalah sebagai berikut:

- Tercapai **18,286** (kolom 7), dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar **109,50%** (kolom 8) terlampaui.
- Dibandingkan persentase capaian tahun lalu sebesar **102,26%** (data Lkj Tahun lalu) indikator sasaran Nilai Lapangan Usaha Perdagangan mengalami peningkatan sebesar **7,24%** (capaian tahun ini dikurang % capaian tahun lalu)
- Dibandingkan dengan target akhir RENSTRA, diproyeksikan sasaran akan berhasil tercapai

Keberhasilan capaian Indikator Persentase peningkatan capaian tersebut didukung dari program-program sebagai berikut :

1. **Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan** dengan sasaran kinerja program meningkatnya tertib usaha, perizinan dan pendaftaran berusaha mempunyai Indikator kinerja persentase tertib usaha perdagangan formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah pelaku usaha berizin (N) dibagi(:) jumlah pelaku Usaha B2 dikalikan (x) 100% realisasi kinerja untuk indikator ini adalah $(400/400) \times 100\% = 100\%$ dari target 100% atau dengan persentase capaian sebesar 100% persentase Capaian kinerja pada Tahun 2025 ini sama jika dibandingkan Tahun 2024 yang sebesar 100% (pesentase capaian tahun lalu).

Target indikator program ini **dapat tercapai** didukung oleh faktor berikut :

- Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung seperti: sistem berbasis digital, koneksi internet dan perlengkapan serta peralatan kerja,
- Kompetensi Sumber Daya Manusia yang terus ditingkatkan dengan mengikuti pelatihan, bimbingan teknis serta webinar yang terkait dengan tugas dan fungsi pegawai,

Target indikator program ini **tidak tercapai** disebabkan kendala sebagai berikut :

- Keterbatasan anggaran yang tersedia untuk program ini sehingga kegiatan pengawasan dan monitoring tidak dapat optimal dilaksanakan
- Tidak adanya kewajiban bagi pelaku usaha untuk memiliki Surat Keterangan Asal ketika melakukan ekspor.

Upaya Perbaikan kedepan adalah sebagai berikut :

- Menguapayakan untuk melakukan peningkatan anggaran,

- Meningkatkan pengawasan dan monitoring kepada pelaku usaha,

2. **PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN** dengan sasaran program Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana Distribusi Perdagangan mempunyai Indikator Persentase sarana distribusi yang terkelola dengan baik formula perhitungan indikator ini adalah $(\text{Jumlah sarana distribusi yang terkelola dengan baik}(N)) \div (\text{Jumlah sarana distribusi yang terkelola}(N)) \times 100\%$. Capaian indikator kinerja adalah $(16/18) \times 100\% = 88,89\%$ (contoh perhitungan persentase capaian program) dari target sebesar 86%. Capaian kinerja pada Tahun 2025 ini lebih tinggi dibandingkan pada Tahun 2024 yang sebesar 86,36% (capaian tahun lalu).

Target indikator program ini **dapat tercapai** didukung oleh faktor berikut :

- Semakin baiknya sistem distribusi,
- Meningkatnya jumlah pasokan barang kebutuhan pokok.

Target indikator program ini **tidak tercapai** disebabkan kendala sebagai berikut :

- Masih lemahnya sistem pengumpulan data dan informasi,
- Tidak tersedianya pusat perdagangan grosir.

Upaya Perbaikan kedepan adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah dan pelaku usaha distribusi,
- Membuat suatu sistem informasi terpadu terkait data informasi perdagangan.

3. **Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting** dengan sasaran kinerja program meningkatkan ketersediaan

barang kebutuhan pokok dan barang penting mempunyai Indikator kinerja persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok (dalam %). formula perhitungan indikator ini adalah Nilai Koefisien Variasi realisasi kinerja untuk indikator ini adalah 4,46 dari target 8% atau dengan persentase capaian sebesar 155,57 persentase Capaian kinerja pada Tahun 2025 ini lebih tinggi dibandingkan Tahun 2024 yang sebesar 8,06(pesentase capaian tahun lalu).

Target indikator program ini **dapat tercapai** didukung oleh faktor berikut:

- a. Sinergi Antar Pemangku Kepentingan :
 - Koordinasi antara pemerintah pusat melalui Kementerian Perdagangan RI dengan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pelaku usaha, distributordan asosiasi konsumen berjalan lebih efektif.
 - Pengawasan peredaran barang dan praktik perdagangan menjadi lebih terkontrol.
- b. Efektivitas Kebijakan Stabilisasi Harga :
 - Pelaksanaan operasi pasar, pasar murah dan pengendalian distribusi yang relatif tepat sasaran mampu menjaga keterjangkauan harga barang kebutuhan pokok.
 - Stabilitas harga meningkatkan kepercayaan konsumen dan mendorong konsumen lebih berdaya dalam mengambil keputusan pembelian.
- c. Akses Informasi Harga yang Semakin Baik :
 - Pemanfaatan sistem informasi harga (online/digital) seperti

sistem aplikasi SP2KP dari Kemendag RI dan publikasi harga secara rutin membantu konsumen membandingkan harga dan memilih produk secara optimal.

- Transparansi informasi memperkuat posisi tawar konsumen.

d. Konsistensi Program Dibanding Tahun Sebelumnya :

- Keberlanjutan program dari tahun 2024 ke 2025 membuat konsumen semakin terbiasa dan memahami mekanisme stabilisasi harga sehingga dampaknya terhadap indeks semakin signifikan.

Target indikator program ini **tidak tercapai** disebabkan kendala sebagai berikut :

a. Fluktuasi Harga Akibat Faktor Eksternal :

- Kenaikan harga akibat gangguan pasokan, perubahan cuaca atau kondisi global dapat mengurangi efektivitas kebijakan stabilisasi harga.
- Konsumen dihadapkan pada ketidakpastian harga dalam jangka pendek.

b. Rendahnya Pemahaman Konsumen di Segmen Tertentu :

- Tidak semua kelompok masyarakat (khususnya konsumen berpendidikan rendah) memiliki tingkat literasi konsumen yang sama.
- Dampak program belum merata di seluruh lapisan masyarakat.

c. Keterbatasan Sumber Daya dan Pengawasan :

- Keterbatasan anggaran dilapangan dapat mempengaruhi konsistensi pengendalian harga dan perlindungan konsumen.

Upaya Perbaikan kedepan adalah sebagai berikut :

- a. Pemerataan Intervensi Stabilisasi Harga :
 - Memperkuat fungsi pemantauan dan monitoring serta intervensi harga disaat berpotensi terjadinya inflasi.
 - Mendorong kolaborasi dengan BUMN pangan dan pelaku usaha lokal.
 - b. Peningkatan Koordinasi dan Pengawasan :
 - Memperkuat sinergi lintas sektor (perdagangan, pangan, transportasi dan perlindungan konsumen).
 - Meningkatkan kualitas pengawasan terhadap praktik penimbunan dan permainan harga.
 - c. Penyempurnaan Target dan Metodologi Indikator :
 - Penyempurnaan metodologi pengukuran untuk menangkap dampak program secara lebih akurat. meningkatkan indeks keberdayaan Konsumen
4. **Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen** sasaran kinerja program meningkatkan indeks keberdayaan Konsumen mempunyai Indikator kinerja indek keberdayaan konsumen. formula perhitungan indikator ini adalah nilai indeks keberdayaan konsumen tahun n realisasi kinerja untuk indikator ini adalah 62,19 dari target 45 atau dengan persentase capaian sebesar 138,2%.persentase Capaian kinerja pada Tahun 2025 ini lebih tinggidibandingkan Tahun 2024 yang sebesar 100% (pesentase capaian tahun lalu).
- Target indikator program ini **dapat tercapai** didukung oleh faktor berikut:
- Kualitas Sumber Daya Manusia yang dimiliki yang memiliki kompetensi dan komitmen dalam menjalankan tugas dan fungsinya

- Koordinasi yang baik dengan stakeholder terkait baik di tingkat pusat ataupun daerah
- Perencanaan dan implementasi kegiatan yang tepat sasaran

Target indikator program ini **tidak tercapai** disebabkan kendala sebagai berikut :

- Kompetensi Sumber Daya Manusia di Kabupaten Kota ,
- Sebaran informasi yang masih kurang di rural area

Upaya Perbaikan kedepan adalah sebagai berikut :

- Memperkuat dan mengembangkan kompetensi Sumber Daya Manusia,
- Menjalin kerjasama dengan stakeholder lainnya diluar Pemerintahan seperti: akademisi, Non Government Organization dan komunitas dll.

5. **Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen (UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang)** dengan sasaran kinerja program Meningkatnya Komoditi Potensial yang Sesuai dengan Ketentuan Berlaku mempunyai Indikator kinerja Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku formula perhitungan indikator ini adalah (Jumlah Komoditi Potensial yang Dipantau (N) /Jumlah Komoditi Potensial Daerah (N)) x 100% realisasi kinerja untuk indikator ini adalah $(1/1) \times 100\% = 100\%$ dari target 1 atau dengan persentase capaian sebesar 100%. persentase Capaian kinerja pada Tahun 2025 ini sama dibandingkan Tahun 2024 yang sebesar 100% (pesentase capaian tahun lalu).

Target indikator program ini **dapat tercapai** didukung oleh faktor berikut:

- Tersedianya regulasi dan kebijakan yang mendukung pelaksanaan kegiatan standardisasi dan perlindungan konsumen.
- Koordinasi dan sinergi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah

daerah, serta pemangku kepentingan terkait.

- Ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dan berpengalaman dalam pelaksanaan kegiatan.
- Dukungan sarana dan prasarana pendukung kegiatan Peningkatan pelayanan pengujian komoditi potensial berdasarkan SNI serta pengembangan dan penambahan ruanglingkup akreditasi/lingkup pengujian (Lada, CPO dan Mikrobiologi dan Beras) ruanglingkup Kalibrasi (Massa dan suhu) yang terakreditasi KAN sehingga dapat meningkatkan kepercayaan stakeholders terhadap Laboratorium Pengujian BPSMB.
- Komitmen pimpinan dan pelaksana kegiatan dalam pencapaian target kinerja.

Target indikator program ini **tidak tercapai** disebabkan kendala sebagai berikut :

- Keterbatasan anggaran dalam mendukung seluruh rencana kegiatan yang telah ditetapkan.
- Terbatasnya jumlah dan kapasitas sumber daya manusia pada beberapa kegiatan teknis.
- Perubahan kebijakan atau kondisi eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan.
- Rendahnya partisipasi atau pemahaman sebagian pelaku usaha dan masyarakat terhadap pentingnya standardisasi dan perlindungan konsumen.

Upaya Perbaikan kedepan adalah sebagai berikut :

- Optimalisasi pelaksanaan pengujian komoditas lada putih, beras, dan

CPO, dengan memastikan seluruh tahapan pengujian dilaksanakan sesuai metode terstandar, persyaratan mutu, dan ruang lingkup akreditasi yang berlaku.

- Penguatan jaminan mutu hasil pengujian, melalui penerapan pengendalian mutu internal, penggunaan bahan acuan tersertifikasi, serta keikutsertaan dalam uji banding/uji profesiensi yang relevan.
- Peningkatan kesiapan sarana dan prasarana laboratorium, termasuk pemenuhan peralatan, bahan habis pakai, dan lingkungan kerja yang mendukung pelaksanaan pengujian secara konsisten dan andal.
- Pelaksanaan kalibrasi alat massa dan suhu secara berkelanjutan, sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan teknis dalam rangka penambahan ruang lingkup akreditasi laboratorium.
- Peningkatan kompetensi personel pengujian dan kalibrasi, melalui pelatihan teknis dan pendampingan, guna menjamin keabsahan hasil uji dan kesiapan laboratorium dalam pengembangan ruang lingkup.

6. **Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri** dengan sasaran kinerja program Mengikatnya Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri mempunyai Indikator kinerja Persentase Produk Lokal yang digunakan, dipromosikan dan dipasarkan melalui Akses Pasar formula perhitungan indikator ini adalah $(\text{Jumlah Produk Lokal yang dipasarkan}(N) / \text{Jumlah Produk Lokal yang di fasilitasi}(N)) \times 100\%$ realisasi kinerja untuk indikator ini adalah $(14/14) \times 100\% = 100\%$ dari target 70% atau dengan persentase capaian sebesar 100. persentase Capaian kinerja pada Tahun 2025 ini lebih rendah dibandingkan Tahun 2024 yang sebesar 200% (pesentase capaian tahun lalu).

Target indikator program ini **dapat tercapai** didukung oleh faktor berikut:

- Terjalin kolaborasi dan sinergi dengan berbagai stakeholder yang mendukung pemasaran produk;
- Kualitas media pendukung pemasaran produk seperti kemasan dan media promosi;
- Fasilitasi penyelenggaraan bimbingan teknis pengenalan marketplace e-commerce melalui platform seperti Bukalapak, Tokopedia, Shoopee dsbnya;
- Fasilitasi Promosi melalui Video ke pelaku usaha yang potensial;
- Fasilitasi penyelenggaraan Sosialisasi Kecintaan Generasi Muda dalam penggunaan produk Indonesia.

Target indikator program ini **tidak tercapai** disebabkan kendala sebagai berikut :

- Masih minimnya kesadaran atau usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mempromosikan produk secara mandiri. Pelaku usaha cenderung sangat bergantung dengan kegiatan-kegiatan promosi dan pemasaran yang dilakukan pemerintah dan stakeholder terkait,
- Masih minimnya kesadaran pelaku usaha untuk membangun citra dan kualitas produk, sehingga berakibat minimnya daya saing produk dipasar nasional.

Upaya Perbaikan kedepan adalah sebagai berikut :

- Melakukan kegiatan promosi yang tepat sasaran;
- Melakukan kolaborasi dan sinergi dengan stakeholder terkait guna mendukung pemasaran produk;
- Melakukan sosialisasi dan pembekalan terhadap peningkatan kualitas

usaha dan produk;

- Melakukan koordinasi sinergi dan kolaborasi pemberdayaan UMKM seperti pendampingan kepada pelaku UKM melalui Forum UMKM terutama yang prematur dalam menjalankan usaha.

7. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (UPTD RPK)

dengan sasaran kinerja program Meningkatnya Fasilitasi Produk Industri yang dipasarkan (UPTD RPK) mempunyai Indikator kinerja Nilai Fasilitasi Produk Industri yang dipasarkan formula perhitungan indikator ini adalah $\{(Jumlah\ Fasilitasi\ Produk\ Industri\ yang\ dipasarkan\ (N) / Jumlah\ Fasilitasi\ Produk\ Industri\ (N)) \times 100\}$. realisasi kinerja untuk indikator ini adalah $(18/18) \times 100\% = 100\%$ dari target 50%. atau dengan persentase capaian sebesar 200%. Persentase Capaian kinerja pada Tahun 2025 ini lebih **tinggi/rendah *** dibandingkan Tahun 2024 yang sebesar 250% (persentase capaian tahun lalu).

Target indikator program ini **dapat tercapai** didukung oleh faktor berikut:

- Meningkatnya Kualitas media pendukung pemasaran produk seperti kemasan dan media promosi,
- Fasilitasi penyelenggaraan bimbingan teknis pengenalan marketplace e-commerce melalui platform seperti Bukalapak, Tokopedia, Shoopee, dll,
- Fasilitasi Promosi melalui Video ke pelaku usaha yang potensial,
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan promosi produk yang tepat sasaran,
- Meningkatkan wadah pemasaran yang dikelola secara baik dan

profesional,

- Meningkatkan jangkauan pemasaran produk baik secara offline maupun online,
- Meningkatkan kolaborasi dan sinergi dengan berbagai stakeholder yang mendukung pemasaran produk,
- Meningkatkan sosialisasi peningkatan kualitas usaha dan produk

Target indikator program ini **tidak tercapai** disebabkan kendala sebagai berikut :

- Ditingkat provinsi, pelaku usaha lokal mendapat ancaman dari masuknya berbagai macam produk nasional,
- Ditingkat nasional, masih kurangnya kesadaran dari pelaku usaha akan pemanfaatan sosial media dan marketplace sebagai wadah promosi dan pemasaran produk,
- Masih minimnya kesadaran atau usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mempromosikan produk secara mandiri. Pelaku usaha cenderung sangat bergantung dengan kegiatan-kegiatan promosi dan pemasaran yang dilakukan pemerintah dan stakeholder terkait,
- Masih minimnya kesadaran pelaku usaha untuk membangun citra dan kualitas produk, sehingga berakibat minimnya daya saing produk dipasar nasional

Upaya Perbaikan kedepan adalah sebagai berikut :

- Menciptakan wadah pemasaran yang profesional untuk menjangkau pasar lokal maupun nasional,
- Melakukan kegiatan promosi yang tepat sasaran
- Meningkatkan kualitas lembaga yang mendukung peningkatan kualitas

media pemasaran produk, seperti : UPTD Rumah Promosi dan Kemasan,

- Melakukan kolaborasi dan sinergi dengan stakeholder terkait guna mendukung pemasaran produk,
- Melakukan sosialisasi dan pembekalan terhadap peningkatan kualitas usaha dan produk.

8. **Program Pengembangan Ekspor** dengan sasaran kinerja program PENGEMBANGAN EKSPOR mempunyai Indikator kinerja Laju Pertumbuhan ekspor formula perhitungan indikator ini adalah (Jumlah ekspor tahun (N)) - (jumlah ekspor tahun (N-1)) dikali 100% dibagi (jumlah ekspor tahun (N-1)) realisasi kinerja untuk indikator laju pertumbuhan ekspor adalah $1.946,54 - 1.698,95 \times 100\% / 1.698,95$ dengan persentase capaian sebesar 14,57%. persentase Capaian kinerja pada Tahun 2025 ini lebih tinggi dibandingkan Tahun 2024 yang sebesar -15,48%.

Target indikator program ini **dapat tercapai** didukung oleh faktor berikut:

- Ketersediaan dan Keberlanjutan Komoditas Unggulan Daerah
- Dukungan Infrastruktur dan Logistik Perdagangan
- Peningkatan Daya Saing Produk melalui Standarisasi dan Mutu
- Fasilitasi Pemerintah Daerah dalam Promosi dan Akses Pasar
- Sinergi Lintas Sektor dan Kebijakan yang Mendukung Ekspor

Target indikator program ini **tidak tercapai** disebabkan kendala sebagai berikut :

- Belum optimalnya akses pasar internasional bagi produk unggulan daerah
- Belum optimalnya pencitraan/branding bagi produk unggulan daerah

Upaya Perbaikan kedepan adalah sebagai berikut :

- Pembinaan dan Penciptaan Eksportir Baru
- Fasilitasi Promosi Dagang dan Perluasan Akses Pasar Internasional
- Peningkatan Kualitas dan Standarisasi Produk Ekspor
- Penguatan Koordinasi dan Sinergi Lintas Instansi
- Pemanfaatan Data dan Informasi Pasar Ekspor

Tabel III.5. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan Nasional Tahun 2025

No.	Indikator dan Formula Perhitungan	Target (Nasional)	Target (PD)	Realisasi (Nasional)	Realisasi (PD)	Capaian (Nasional)	Capaian (PD)
1.	Nilai Lapangan Usaha Perdagangan	*	16,750	3.136,6	18,286	*	109,50%
	Formula Perhitungan: Nilai PDRB Lapangan Usaha Perdagangan Tahun (N)						

[Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan IV-2025](#)
BRS No. 12/02/19/Th. XXIV, 5 Februari 2026

- Jika dibandingkan dengan target Nasional, Target indikator Nilai Lapangan Usaha Perdagangan berada sebagai bagian dari Target Nasional.
- Jika dibandingkan dengan Realisasi Nasional Target indikator Nilai Lapangan Usaha Perdagangan berada sebagai bagian dari Realisasi Nasional.
- Sebagai kesimpulan capaian indikator Nilai Lapangan Usaha Perdagangan berada mendukung capaian Nasional yaitu sebesar 0,583 % $(18,286/3.136,6)*100\%$

3.1.1.1. Data Dukung Capaian Nilai Lapangan Usaha Perdagangan melalui:


- Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan melekat pada Bidang Pengendalian Perdagangan dan Perlindungan Konsumen kegiatan





sebagai berikut, yaitu :

- a. Kegiatan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor dengan anggaran sebesar Rp 0
- b. Kegiatan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp 0
- c. Kegiatan Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar dengan anggaran sebesar Rp 0
- d. Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API) dengan anggaran sebesar Rp 6.998.800,-

Gambar III.3

Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
Kegiatan Koordinasi Dan Singkronisasi Layanan Penerbitan Surat Keterangan Asal (Ska)

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1.		- Koordinasi Dan Singkronisasi Layanan Penerbitan Surat Keterangan Asal (Ska)

2.		<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Dan Singkronisasi Layanan Penerbitan Surat Keterangan Asal (Ska)
3.		<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Dan Singkronisasi Layanan Penerbitan Surat Keterangan Asal (Ska)
4.		<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Dan Singkronisasi Layanan Penerbitan Surat Keterangan Asal (Ska)
5.		<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Dan Singkronisasi Layanan Penerbitan Surat Keterangan Asal (Ska)

- Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan melekat pada Bidang Sarana Perdagangan dan Pengembangan Ekspor kegiatan sebagai berikut, yaitu :
 - a. Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi Serta Lelang Komoditas dengan anggaran sebesar Rp 27.014.500

Gambar III.4
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi
Provinsi Serta Lelang Komoditas

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1.		<p>- Pemantauan dan pembinaan terhadap beberapa sarana distribusi perdagangan (pasar) yang berada di 7 Kabupaten/Kota se- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</p>
2.		<p>- Pemantauan dan pembinaan terhadap beberapa sarana distribusi perdagangan (pasar) yang berada di 7 Kabupaten/Kota se- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</p>

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
3.		<ul style="list-style-type: none"> - Pemantauan dan pembinaan terhadap beberapa sarana distribusi perdagangan (pasar) yang berada di 7 Kabupaten/Kota se- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4.		<ul style="list-style-type: none"> - Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas - Melakukan identifikasi terhadap pelaku usaha potensial Toko distribusi beras lokal dan madu milik HM. Zaiwan yang berada di Desa Namang Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
5.		<ul style="list-style-type: none"> - Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas - Melakukan identifikasi terhadap pelaku usaha potensial di rumah produksi "Gurih DD" milik Ibu Daddi di Desa Kurau Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

- Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting melekat pada Bidang Pengendalian Perdagangan dan Perlindungan Konsumen kegiatan sebagai berikut, yaitu :
 - a. Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp 10.246.850

Gambar III.5
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1.		<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor
2.		<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor

3.		<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor
4.		<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor
5.		<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor

b. Kegiatan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten / Kota yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan dengan anggaran sebesar Rp 45.760.750

Gambar III.5
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
Kegiatan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Penting pada Pelaku
Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten / Kota yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi
Perdagangan

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1.		<ul style="list-style-type: none"> - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota
2.		<ul style="list-style-type: none"> - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota

3.		<ul style="list-style-type: none"> - Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
4.		<ul style="list-style-type: none"> - Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

- c. Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Peptisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya dengan anggaran sebesar Rp 10.150.600

Gambar III.5
 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
 Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Peptisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan
 Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah
 Kerjanya

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1.		<ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi
2.		<ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi
3.		<ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi

4.



- Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi

- Program Pengembangan Ekspor melekat pada Bidang Sarana Perdagangan dan Pengembangan Ekspor kegiatan sebagai berikut, yaitu:
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada Lebih Dari 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam Provinsi dengan anggaran sebesar Rp 15.051.700

Gambar III.5
Program Pengembangan Ekspor
Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang
bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada Lebih Dari 1(Satu) Daerah
Kabupaten/Kota Dalam Provinsi

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1.		<ul style="list-style-type: none"> - Pameran Dagang Internasional/ Nasional – Pameran Trade Expo Indonesia (TEI) di ICE, BSD City, Tangerang, 15-19 Oktober 2025
2.		<ul style="list-style-type: none"> - Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan – Bussines Pitching 06 Oktober 2025 diikuti oleh Pelaku Usaha : CV. Laris Jaya (Lada Putih); Bumdesma Mitra Lada Bersatu; Biliton Spice; Kopi Bunda Hara
3.		<ul style="list-style-type: none"> - Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan – Bussines Pitching 29 Juli 2025 diikuti oleh Pelaku Usaha : <ol style="list-style-type: none"> 1. Deshanda (Produk Kerajinan Lidi Nipah) 2. Insolusi Gallery (Produk Kerajinan Bambu) 3. Bangkayu (Produk Kerajinan Kayu) 4. Biliton Spice (Produk Lada Putih) 5. Kopi Petaling (Produk Kopi)



- Peningkatan Citra Produk Ekspor

- Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen melekat pada Bidang Pengendalian Perdagangan dan Perlindungan Konsumen kegiatan sebagai berikut, yaitu :
 - a. Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/ Kota dengan anggaran sebesar Rp 209.580.000

Gambar III.5
Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/ Kota

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1.		- Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen

2.		<ul style="list-style-type: none"> - Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen
3.		<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen
4.		<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen

- b. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp 14.624.150

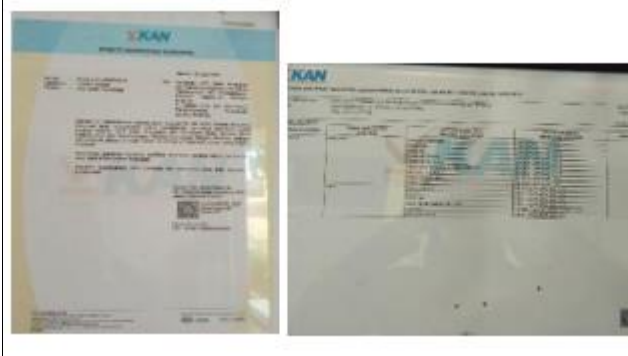
Gambar III.5
Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1.	 <p>18 Feb 2025 09:56:42 no-8991 riva kelapa Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat Kepulauan Bangka Belitung</p>	<p>Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga – Bangka Barat - Objek: Rice Cooker, Blender, Ketel Listrik, Water Dispenser, Regulator Tegangan Rendah</p>
2.		<p>- Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga - Bangka – Objek : Printer, Keramik, Closet Duduk</p>



- Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen (BPSMB) melekat pada UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang kegiatan sebagai berikut, yaitu :
 - a. Kegiatan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah (BPSMB) dengan anggaran sebesar Rp 269.717.743

Gambar III.7
Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen (BPSMB)
Kegiatan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah (BPSMB)

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1.		Subkegiatan: Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi


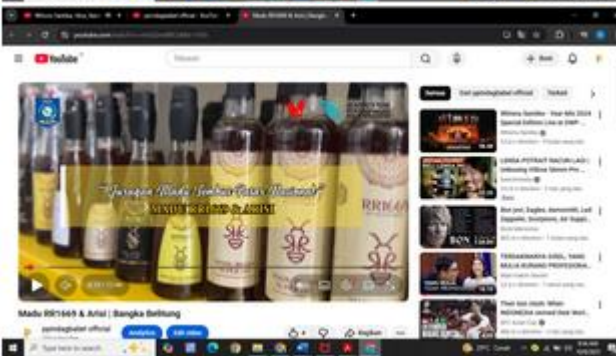
No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
2.		Subkegiatan Pelaksanaan Pemantauan Mutu Produk
3.		Subkegiatan Pengembangan pelayanan Kalibrasi
4.		Subkegiatan Pengembangan Layanan Pengujian

- Program Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri melekat pada Bidang Sarana Perdagangan dan Pengembangan Ekspor kegiatan sebagai berikut, yaitu :
 - a. Kegiatan Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri dengan

anggaran sebesar Rp 21.819.250

Gambar III.5

Program Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
Kegiatan Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1.		- Fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi – Peliputan Video
2.		- Fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi – Peliputan Video

- b. Kegiatan Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri dengan anggaran sebesar Rp 8.434.050

Gambar III.5

Program Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
Kegiatan Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1.		<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi - Bimbingan Teknis Penguatan Branding Produk melalui E-Commerce

- c. Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dengan anggaran sebesar Rp 8.466.700

Gambar III.5


Program Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1.		<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri - Sosialisasi Bangga Buatan Indonesia yang diikuti oleh Generasi Muda

- Program Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (RPK) melekat pada UPTD Rumah Promosi dan Kemasan kegiatan sebagai berikut, yaitu :
 - a. Kegiatan Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri (RPK) dengan anggaran sebesar Rp 0
 - b. Kegiatan Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri (RPK) dengan anggaran sebesar Rp 0
 - c. Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (RPK) dengan anggaran sebesar Rp 38.152.200

Gambar III.5

Program Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (UPTD RPK)
Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1.		<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi – Rajungan (Rabu Kunjungan) ke UMKM Pengguna Jasa UPTD RPK

2.		<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi – Promosi UPTD RPK di Media Sosial
3.		<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi - Fasilitasi Desain Media Promosi Bagi UMKM Pengguna Jasa UPTD RPK

3.2 Efisiensi Anggaran

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel III.6. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan	Nilai Lapangan Usaha Industri Pengolahan	22,300	24,692	110,72%	733.718.300	636.978.031	86,82%	96.740.269
2.	Meningkatnya Lapangan Usaha Perdagangan	Nilai Lapangan Usaha Perdagangan	16,700	18,286	109,50%	690.138.993	602.994.996	87,37%	87.143.997
Total Belanja						1.423.857.293	1.239.973.027	87,08%	183.884.266 (efisiensi)

Sumber: SIPD, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Th 2025, Laporan Keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2025

Berdasarkan tabel III.6 di atas capaian kinerja sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melampaui target kinerja tahun 2025 dengan target anggaran belanja program/kegiatan yang terkait langsung pada pencapaian sasaran sebesar Rp 1.423.857.293 , terealisasi Rp 1.239.973.027 atau 87,08% sehingga dapat dikatakan terdapat efisiensi Rp 183.884.266 yang bersumber dari:

- Efisiensi Belanja Operasi dan,
- Efisiensi Belanja Modal.

3.3 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025

Berdasarkan Surat Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 700/117/LHE-ITDA/2025 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP PD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TA. 2024 telah disusun Tindak lanjut adalah sebagai berikut :

Tabel III.7 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025

NO	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAKLANJUT	TARGET	RENCANA WAKTU PELAKSANAAN (BULAN)	STATUS/ PROGRES PENYELESAIAN/ OUTPUT	PELAKSANAAN				LINK BUKTI DUKUNG
						TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Setiap unit/satuan kerja memahami, peduli, serta berkomitmen terhadap pencapaian kinerja	Melaksanakan rapat internal evaluasi SAKIP per triwulan	1 Kegiatan	Juli 2025	Selesai			V		Notulen, daftar hadir rapat https://drive.google.com/drive/folders/1s0p_2Va1tmK1r006IDt0OgE4ctDs_BAS?usp=sharing
2	Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja secara berjenjang	Menyusun jadwal monitoring & evaluasi capaian kinerja per triwulan, dengan laporan ke pimpinan	1 Laporan	Juli 2025	Selesai			V		Laporan Monev, rekap capaian indicator https://drive.google.com/drive/folders/1s0p_2Va1tmK1r006IDt0OgE4ctDs_BAS?usp=sharing
3	Mendapatkan pelaporan kinerja dari masing-masing bidang	Menetapkan format laporan kinerja triwulanan tiap bidang dan mengupload ke folder drive bersama	1 Laporan	Juli 2025	Selesai			V		Surat Permintaan Bukti Dukung SAKIP 2025 https://drive.google.com/drive/folders/1s0p_2Va1tmK1r006IDt0OgE4ctDs_BAS?usp=sharing

4	Mendokumentasikan seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan	Membuat bank data dokumen (foto, laporan, notulen, SK, publikasi) berbasis cloud drive	1 Laporan	Juli 2025	Selesai			V		Surat Permintaan Dokumen Kegiatan 2025 https://drive.google.com/drive/folders/1s0p_2Va1tmK1r006Dt0OgE4ctDs_BAS?usp=sharing
5	Menindaklanjuti evaluasi KemenPAN-RB terkait pelaporan kinerja yang belum memuat informasi strategi perbaikan	Menambahkan Subbab khusus "Strategi Perbaikan" dalam LKjIP 2025	1 Laporan	Agustus 2025	Selesai			V		Draft LKjIP dengan tambahan Subbab Strategi Perbaikan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2025 https://drive.google.com/drive/folders/1s0p_2Va1tmK1r006Dt0OgE4ctDs_BAS?usp=sharing

Mengetahui,
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

SUBEKTI SAPUTRA, S.TP., M.M.

NIP. 19830729 200903 1 003

3.4 Inovasi

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparaturnya untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka inovasi yang telah dikembangkan dalam pencapaian sasaran kinerja antara lain:

- a. WAG Kinerja, untuk memudahkan koordinasi mengenai pengembangan/permasalahan aplikasi kinerja.
- b. Aplikasi SI KELASAN (Sistem Informasi Kendali dan Layanan Kemasan) yang berbasis web-based apps, yang bertujuan untuk memudahkan para pelaku usaha IKM se- Provinsi Babel dalam memesan kemasan tanpa harus datang ke UPTD Rumah Promosi dan Kemasan guna menjangkau IKM/UMKM di seluruh Babel
- c. RAJUNGAN (Rabu Kunjungan) ke pelaku UMKM pengguna jasa UPTD Rumah Promosi dan Kemasan
- d. Aplikasi Sistem Pasar Lelang Terpadu, untuk Pasar Lelang Online bersama Koperasi Petani Lada Bangka Belitung
- e. Layanan Pengaduan Konsumen Online
 - o WA: 08117109666
 - o IG: Perlindungan Konsumen Babel
 - o FB: Perlindungan Konsumen Babel

3.5 Penghargaan

Sepanjang Tahun 2025 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah berhasil mendapat penghargaan sebagai berikut :

1. Piagam Penghargaan dari Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung karena telah Mengutamakan Penggunaan Bahasa Negara di Ruang Publik dan Dokumen Lembaga

3.6 Crosscutting

Cross cutting adalah penjabaran dari instansi atau Perangkat Daerah mana saja yang bekerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pelaksanaan program kerjanya untuk Pelaksanaan Pemantauan Ketersediaan Bapokting, stabilitas harga dan Operasi Pasar Murah

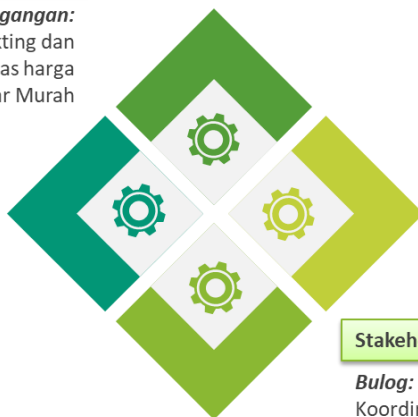
CROSS CUTTING

Pemerintah Provinsi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan:
Ketersediaan Bapokting dan
Pemantauan stabilitas harga
Operasi Pasar Murah

Lintas OPD

TPID:
Pemantauan stabilitas harga dan Inflasi
Dinas Perhubungan:
Koordinasi distribusi Bapokting
Dinas Pertanian:
Koordinasi produksi dan harga pangan
Kecamatan dan Kelurahan/Desa:
Koordinasi Pelaksanaan Pasar Murah



Pemerintah Pusat

Bank Indonesia Perwakilan Kep. Babel:
Koordinasi pelaksanaan pasar murah
dan stabilitas harga
BPS Provinsi Kep. Babel:
Koordinasi pemantauan IHK

Stakeholder Lainnya

Bulog:
Koordinasi Ketersediaan stok
Penyediaan Bapok
Distributor:
Penyediaan Bapokting

BAB 4

Penutup

Bab 4 Berisi :

1. Kesimpulan
2. Rekomendasi
3. Rencana Aksi

5.1 Kesimpulan

Hasil laporan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari analisis 2 (dua) sasaran, terdapat 2 (dua) indikator kinerja utama yang dipilih sebagai tolak ukur. Pada tahun 2025, indikator kinerja Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan tercapai dengan presentase **110,72%** dengan capaian Nilai Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar **24,692** triliun Rupiah, dan indikator kinerja Meningkatnya Lapangan Usaha Perdagangan tercapai dengan presentase **109,50%** dengan capaian Nilai Lapangan Usaha Perdagangan sebesar **18,286** Triliyun Rupiah.
2. Keberhasilan tercapainya kinerja tidak lepas dari Pertumbuhan pada subkategori industri makanan dan minuman dan kerajinan melalui program dan kegiatan penumbuhan wirausaha baru industri dan fasilitasi pembuatan perizinan usaha. Kebijakan pemerintah daerah melalui berbagai kebijakan dan insentif, termasuk perbaikan infrastruktur dan kemudahan perizinan memberikan peluang investasi di sektor industri pengolahan dan sektor-sektor potensial lainnya. Adanya dukungan kebijakan pemerintah mengintegrasikan seluruh proses perizinan ke

dalam sistem perizinan elektronik melalui sistem OSS (Online Single Submission) dan Adanya kolaborasi antar OPD terkait pelaksanaan kegiatan pengawasan dan verifikasi teknis perizinan berusaha pada sektor industri pengolahan. Sedangkan pada sektor perdagangan Semakin baiknya sistem distribusi, Meningkatnya jumlah pasokan barang kebutuhan pokok. Tersedianya pengelola Pasar Lelang Komoditas. Melakukan Operasi Pasar dan Pasar Murah dalam rangka pengendalian inflasi. Melakukan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting adanya sinergitas dengan pelaku usaha guna menciptakan ketahanan dan ketersediaan bahan pokok. Lancarannya distribusi barang kebutuhan pokok ke pasar-pasar rakyat dengan cara berkoordinasi dengan stakeholder terkait untuk memberikan prioritas distribusi untuk barang kebutuhan pokok dan memberikan prioritas bongkar muat di pelabuhan untuk komoditas barang kebutuhan pokok.

5.2 Rekomendasi

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Percepatan hilirisasi produk-produk dalam RPIP dengan melibatkan stakeholder terkait
2. Meningkatkan kolaborasi antar OPD terkait pelaksanaan kegiatan pengawasan dan verifikasi teknis perizinan berusaha
3. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah dan pelaku usaha distribusi
4. Meningkatkan sinergitas dengan pelaku usaha guna menciptakan

- ketahanan dan ketersediaan bahan pokok
5. Meningkatkan pengawasan kepada distributor dan agen-agen agar tidak melakukan penimbunan barang kebutuhan pokok dan barang penting di saat terjadi kelangkaan barang
 6. Koordinasi Penyampaian informasi mengenai Laboratorium terakreditasi KAN melalui berbagai media elektronik
 7. Meningkatkan peran UPTD BPSMB dalam pengujian CPO.

5.3 Rencana Aksi

Adapun rencana aksi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi sebagai berikut:

1. Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang kepatuhan dalam berusaha sektor industri bagi pelaku industri
2. Melaksanakan Sosialisasi terkait tata cara pengisian dan pelaporan SIINas
3. Melakukan pembinaan dan pengawasan terkait dengan administrasi perizinan terhadap pelaku usaha perdagangan
4. Memberikan pembinaan dan sanksi bagi pelaku usaha yang tidak memiliki perizinan
5. Melakukan pemantauan dan pengawasan harga di pasar tradisional/ritel modern/lokal
6. Melakukan pemantauan dan pengawasan stok barang kebutuhan bahan pokok di tingkat distributor/sub distributor
7. Melakukan kegiatan operasi pasar dan pasar murah di Kabupaten/Kota
8. Melaksanakan monitoring, pelaporan, distribusi barang kebutuhan

pokok di tingkat distributor/sub distributor

9. Penyelenggaraan edukasi, sosialisasi dan advokasi konsumen yang efektif
10. Pelibatan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan peredaran barang/jasa, dengan cara meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kepada konsumen mengenai lokasi dan fungsi dari lembaga-lembaga penyelesaian sengketa konsumen, mulai dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), termasuk Kementerian Perdagangan selaku leading sector perlindungan konsumen
11. Melakukan kegiatan promosi yang tepat sasaran, kolaborasi dan sinergi dengan stakeholder terkait guna mendukung pemasaran produk, peningkatan kualitas produk UMKM
12. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, dan Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait tindak lanjut dari keselarasan dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja Urusan Perindustrian dan Perdagangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
13. Koordinasi dan harmonisasi intensif dengan SKPD dan Pemerintah Pusat.
14. Implementasi hasil kegiatan perlu dimonitor dan dievaluasi secara berkala agar pelaksanaan kegiatan tersebut dapat terus berkembang dan meningkat pada periode mendatang sesuai

dinamika dan target yang telah ditetapkan.

15. Koordinasi dan komunikasi internal Dinas Perindustrian dan Perdagangan secara lebih intensif.



LAMPIRAN





Tabel 7.1.1 Indikator Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD 2023-2026

No	TUJUAN RPD	SASARAN RPD	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN RPD	INDIKATOR KINERJA PERINDAG	KONDISI KINERJA PADA AWAL PRIODE RPD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPD
					RPD	2023	2024	2025	2026	RPD
	Meningkatnya ekonomi Daerah		Pertumbuhan PDRB		5,05	4,28	4,39	4,46	4,78	5,78
		Meningkatnya PDRB Sektor Industri Pengolahan	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan		-5,64	1,86	3,25	4,50	4,55	4,55
				Persentase Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri Pengolahan	2,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,00
				Nilai Lapangan Usaha Industri Pengolahan (Triliyun Rp)	14,500	15,250	16,000	16,750	17,500	17,500
		Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perdagangan	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perdagangan		-4,62	6,50	4,94	5,50	5,55	5,55
				Presentase Pertumbuhan Lapangan Usaha Perdagangan	2,00	2,50	2,75	3,00	3,25	3,25
				Nilai Lapangan Usaha Perdagangan (Triliyun Rp)	11,750	12,250	12,900	13,550	14,200	14,200
	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi.		Indeks Reformasi Birokrasi		66,08	68,25	69,00	69,75	70,50	70,51
		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi		66,08	68,25	69,00	69,75	70,50	70,51
				Predikat RB Perangkat Daerah		67	67	67	67	67
				Nilai RB Perangkat Daerah		67	67	67	67	67



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jalan Pulau Bangka, Komplek Perkantoran Pemprov, Air Itam, Bukit Intan, Pangkalpinang 33148

Telp : 0717 – 439 093

Web : <http://perindag.babelprov.go.id>

Fax : 0717 – 439093

email : perindag@babelprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 188.4/053/SK/DISPERINDAG/2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN NOMOR 188.4/004/SK/DISPERINDAG/2024
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023, melalui Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor: B274/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023 yaitu “menggunakan informasi capaian kinerja pada laporan kinerja sebagai dasar penentuan Target tahun selanjutnya, penyesuaian aktivitas strategi untuk mencapai kinerja, dan kebutuhan anggarannya”;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan penyesuaian pada kolom Target Perjanjian Kinerja Tahun 2024-2026 pada Indikator Kinerja Utama Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022-2026.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dearah Provinsi Kepulana Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulana Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
8. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 45 Seri E);
9. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 14 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 – 2026;
10. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 16 Seri E).

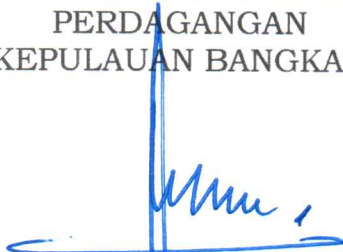
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 05 Mei 2025

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


Drs. H. TARMIN, M. Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19681111 199009 1 001

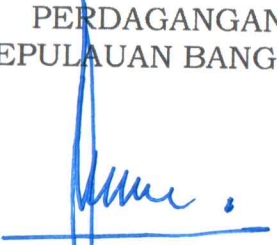
Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN
 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
 TAHUN 2022-2026**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET					Definisi	Formula Perhitungan (rumus menghitung realisasi target)	Bidang Penanggung jawab
			Tahun 2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan	Nilai Lapangan Usaha Industri Pengolahan Trilyun (Rp)	14,500	15,250	16,000	16,750	17,500	Nilai PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan	Nilai PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan (N)	Dinas Perindag UPTD RPK	
	<i>* Revisi target dari pencapaian tahun sebelumnya</i>				21,750	22,300	22,500				
2	Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Perdagangan	Nilai Lapangan Usaha Perdagangan Trilyun (Rp)	11,750	12,250	12,900	13,550	14,200	Nilai PDRB Lapangan Usaha Perdagangan	Nilai PDRB Lapangan Usaha Perdagangan (N)	Dinas Perindag UPTD BPSMB UPTD RPK	
	<i>* Revisi target dari pencapaian tahun sebelumnya</i>				16,150	16,700	17,000				

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
 PERDAGANGAN
 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


 Drs. H. TARMIN, M. Si
 PEMBINA UTAMA MADYA
 NIP. 19681111 199009 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TARMIN
Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : SUGITO
Jabatan : Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalpinang, Januari 2025

PIHAK KEDUA
Pj. GUBENUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SUGITO

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROV. KEP. BANGKA BELITUNG,

TARMIN
Pembina Utama Madya
NIP. 19681111 199009 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Formula Penghitungan Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan	Nilai Lapangan Usaha Industri Pengolahan (Triliyun Rp)	16,750	Nilai PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan (N)
2.	Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Perdagangan	Nilai Lapangan Usaha Perdagangan (Triliyun Rp)	13,550	Nilai PDRB Lapangan Usaha Perdagangan (N)

Anggaran : Rp 2.153.104.243

NO	Indikator Kinerja (Kolom 3)	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Nilai Lapangan Usaha Industri Pengolahan	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Rp. 791.999.350	APBD
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri (UPTD. RPK)	Rp. 215.990.600	APBD
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Rp. 95.999.950	APBD
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp. 36.992.500	APBD
2.	Nilai Lapangan Usaha Perdagangan	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Rp. 26.989.950	APBD
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp. 48.889.600	APBD
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Rp. 108.309.000	APBD
		Program Pengembangan Ekspor	Rp. 26.999.650	APBD

	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Rp. 407.999.350	APBD
	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen (UPTD. BPSMB)	Rp. 284.945.343	APBD
	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp. 55.988.950	APBD
	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (UPTD. RPK)	Rp. 52.000.000	APBD

Anggaran Penunjang (Kesekretariatan) : Rp 21.676.642.545

NO	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 21.307.025.413	APBD
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (UPTD. BPSMB)	Rp. 182.704.732	APBD
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (UPTD. RPK)	Rp. 186.912.400	APBD

Pendukung : Rp 1.061.462.000

NO	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Perdagangan Dalam Negeri (Tugas Pembantuan Non Fisik)	Rp 275.351.000	APBN
2.	Program Perdagangan Luar Negeri	Rp 0	APBN
3.	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp 786.111.000	APBN

Pangkalpinang, Januari 2025

PIHAK KEDUA,
Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

SUGITO

PIHAK PERTAMA,
KEPALA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

TARMIN
Pembina Utama Madya
NIP. 19681111 199009 1 001



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TARMIN
Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : HIDAYAT ARSANI
Jabatan : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalpinang, Juli 2025

PIHAK KEDUA
GUBENUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

HIDAYAT ARSANI

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROV. KEP. BANGKA BELITUNG,

TARMIN
Pembina Utama Madya
NIP. 19681111 199009 1 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

NO.	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Formula Penghitungan Indikator	NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Formula Penghitungan Indikator
(1)	(2)	(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan	Nilai Lapangan Usaha Industri Pengolahan (Trilyun Rp)	16,750	Nilai PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan (N)	1.	Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan	Nilai Lapangan Usaha Industri Pengolahan (Trilyun Rp)	22,300	Nilai PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan (N)
2.	Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Perdagangan	Nilai Lapangan Usaha Perdagangan (Trilyun Rp)	13,550	Nilai PDRB Lapangan Usaha Perdagangan (N)	2.	Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Perdagangan	Nilai Lapangan Usaha Perdagangan (Trilyun Rp)	16,700	Nilai PDRB Lapangan Usaha Perdagangan (N)

Anggaran Perubahan: Rp. 1.631.152.893

NO.	Indikator Kinerja (Kolom 8)	Program	Anggaran	Anggaran Perubahan*	Keterangan	
						Program
1.	Nilai Lapangan Usaha Industri Pengolahan	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Rp. 791.999.350	Rp. 592.506.350	APBDP	
			Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri (UPTD. RPK)	Rp. 215.990.600	Rp. 205.926.300	APBDP
			Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Rp. 95.999.950	Rp. 54.225.500	APBDP
			Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp. 36.992.500	Rp. 22.214.850	APBDP

2.	Nilai Lapangan Usaha Perdagangan	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Rp. 26.989.950	Rp. 11.994.600	APBDP
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp. 48.889.600	Rp. 33.371.900	APBDP
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Rp. 108.309.000	Rp. 75.371.850	APBDP
		Program Pengembangan Ekspor	Rp. 26.999.650	Rp. 15.051.800	APBDP
		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Rp. 407.999.350	Rp. 270.855.950	APBDP
		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen (UPTD. BPSMB)	Rp. 284.945.343	Rp. 269.717.743	APBDP
		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp. 55.988.950	Rp. 40.680.950	APBDP
		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (UPTD. RPK)	Rp. 52.000.000	Rp. 39.235.100	APBDP

* *Anggaran Pergeseran1*

Anggaran Penunjang Perubahan (Kesekretariatan): Rp. 21.241.267.613

NO.	Program	Anggaran	Anggaran Perubahan*	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 21.307.025.413	Rp. 20.915.694.628	APBDP
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (UPTD. BPSMB)	Rp. 182.704.732	Rp. 157.076.285	APBDP
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (UPTD. RPK)	Rp. 186.912.400	Rp. 168.496.700	APBDP

* *Anggaran Pergeseran1*

Anggaran Pendukung Perubahan: Rp. 1.061.462.000

NO.	Program	Anggaran	Anggaran Perubahan*	Keterangan
1.	Program Perdagangan Dalam Negeri (Tugas Pembantuan Non Fisik)	Rp. 275.351.000	Rp. 275.351.000	APBN
2.	Program Perdagangan Luar Negeri	Rp. 0	Rp. 0	APBN
3.	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp. 786.111.000	Rp. 786.111.000	APBN

* Anggaran Perubahan

Pangkalpinang, Juli 2025

PIHAK KEDUA
GUBENUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


HIDAYAT ARSANI

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROV. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


TARIMEN
Kepala Dinas Madya
NIP. 19681111 199009 1 001



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

JL. Pulau Bangka Kompleks Perkantoran dan Pemukiman Terpadu
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kelurahan Air Itam Pangkalpinang 33148
Telp/Faks : (0717) 439093, Email : perindag@babelprov.go.id, Website :
<http://perindag.babelprov.go.id>

BERITA ACARA

Nomor : BA-027/DISPERINDAG/PK/2025

Pada hari ini Jumat, tanggal delapan bulan Juli tahun dua ribu dua puluh lima, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun Anggaran 2025 (terlampir).

Demikian Berita Acara penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun Anggaran 2025 dibuat dengan sesungguhnya dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Pangkalpinang
Pada tanggal 08 Juli 2025

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Drs. H. TARMIN , M.Si
196811111990091001



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

JL. Pulau Bangka Kompleks Perkantoran dan Pemukiman Terpadu
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kelurahan Air Itam Pangkalpinang 33148
Telp/Faks : (0717) 439093, Email : perindag@babelprov.go.id, Website :
<http://perindag.babelprov.go.id>

BERITA ACARA

Nomor : BA-049/DISPERINDAG/PK/2025

Pada hari ini Jumat, tanggal tujuh bulan November tahun dua ribu dua puluh lima, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun Anggaran 2025 (terlampir).

Demikian Berita Acara penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun Anggaran 2025 dibuat dengan sesungguhnya dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Pangkalpinang
Pada tanggal 07 November 2025

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Drs. H. TARMIN , M.Si
196811111990091001



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YENNI ASMITA
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : HIDAYAT ARSANI
Jabatan : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalpinang, November 2025

PIHAK KEDUA
GUBENUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

HIDAYAT ARSANI

PIHAK PERTAMA
Plt. KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROV. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



YENNI ASMITA
Pembina Utama Muda
NIP. 19800504 200003 2 002

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

NO.	Sebelum Perubahan				NO.	Setelah Perubahan			
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Formula Penghitungan Indikator		Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Formula Penghitungan Indikator
(1)	(2)	(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan	Nilai Lapangan Usaha Industri Pengolahan (Triliyun Rp)	16,750	Nilai PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan (N)	1.	Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan	Nilai Lapangan Usaha Industri Pengolahan (Triliyun Rp)	22,300	Nilai PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan (N)
2.	Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Perdagangan	Nilai Lapangan Usaha Perdagangan (Triliyun Rp)	13,550	Nilai PDRB Lapangan Usaha Perdagangan (N)	2.	Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Perdagangan	Nilai Lapangan Usaha Perdagangan (Triliyun Rp)	16,700	Nilai PDRB Lapangan Usaha Perdagangan (N)

Anggaran Perubahan: Rp. 1.423.857.293

NO.	Indikator Kinerja (Kolom 8)	Program	Anggaran	Anggaran Perubahan*	Keterangan
1.	Nilai Lapangan Usaha Industri Pengolahan	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Rp. 791.999.350	Rp. 464.684.550	APBD
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri (UPTD. RPK)	Rp. 215.990.600	Rp. 205.926.300	APBD
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Rp. 95.999.950	Rp. 43.725.500	APBD
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp. 36.992.500	Rp. 19.381.950	APBD

NO.	Indikator Kinerja (Kolom 8)	Program	Anggaran	Anggaran Perubahan*	Keterangan
2.	Nilai Lapangan Usaha Perdagangan	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Rp. 26.989.950	Rp. 11.120.500	APBD
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp. 48.889.600	Rp. 27.014.500	APBD
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Rp. 108.309.000	Rp. 66.158.200	APBD
		Program Pengembangan Ekspor	Rp. 26.999.650	Rp. 15.051.700	APBD
		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Rp. 407.999.350	Rp. 224.204.150	APBD
		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen (UPTD. BPSMB)	Rp. 284.945.343	Rp. 269.717.743	APBD
		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp. 55.988.950	Rp. 38.720.000	APBD
		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (UPTD. RPK)	Rp. 52.000.000	Rp. 38.152.200	APBD

* Anggaran Perubahan

Anggaran Penunjang Perubahan (Kesekretariatan): Rp. 19.614.686.385

NO.	Program	Anggaran	Anggaran Perubahan*	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 21.307.025.413	Rp. 19.322.193.105	APBD
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (UPTD. BPSMB)	Rp. 182.704.732	Rp. 128.496.580	APBD
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (UPTD. RPK)	Rp. 186.912.400	Rp. 163.996.700	APBD

* Anggaran Perubahan

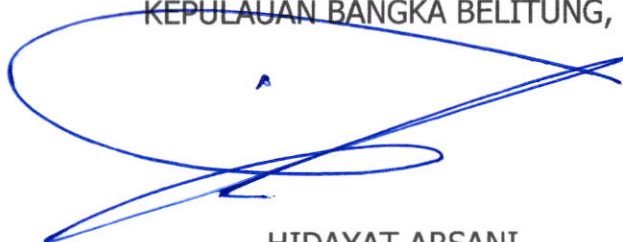
Anggaran Pendukung Perubahan: Rp. 1.061.462.000

NO.	Program	Anggaran	Anggaran Perubahan*	Keterangan
1.	Program Perdagangan Dalam Negeri (Tugas Pembantuan Non Fisik)	Rp. 275.351.000	Rp. 275.351.000	APBN
2.	Program Perdagangan Luar Negeri	Rp. 0	Rp. 0	APBN
3.	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp. 786.111.000	Rp. 786.111.000	APBN

* Anggaran Perubahan

Pangkalpinang, November 2025

PIHAK KEDUA
GUBENUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



HIDAYAT ARSANI

PIHAK PERTAMA
Pit. KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROV. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



YENNI ASMITA
Pembina Utama Muda
NIP. 19800504 200003 2 002



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. Pulau Bangka Kompleks Perkantoran dan Pemukiman Terpadu
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kelurahan Air Itam Pangkalpinang 33148
Telp/Faks : (0717) 439093, Email : perindag@babelprov.go.id, Website :
<http://perindag.babelprov.go.id>

BERITA ACARA

Nomor : BA-022/DISPERINDAG/TW I/2025

Pada hari ini Rabu, tanggal delapan belas bulan April tahun dua ribu dua puluh lima, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan penyusunan Laporan Monev Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2025 (terlampir).

Demikian Berita Acara Validasi Laporan Monev Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2025 dibuat dengan sesungguhnya dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Pangkalpinang
Pada tanggal 18 April 2025

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Drs. H. TARMIN , M.Si
196811111990091001

**MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI KINERJA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2025	TRIWULAN IV						PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
					TERGET KINERJA TW I	REALISASI KINERJA TW I (C)	PERSENTASE CAPAIAN TW I	PENJELASANAN PROGRES TW I	PERSENTASE CAPAIAN s.d. TW I	PERSENTASE REALISASI ANGGARAN TW I	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan	Nilai Lapangan Usaha Industri Pengolahan	Triliyun (Rp)	16,750	4,000	5,830	145,75%	<ul style="list-style-type: none"> o Program Perencanaan dan Pembangunan Industri o Program Pengendalian Izin Usaha Industri o Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional o Program Perencanaan dan Pembangunan Industri (RPK) 	145,75%	9,91%	<ul style="list-style-type: none"> o Bidang Pengendalian dan Fasilitasi Usaha Industri o Bidang Perencanaan dan Pembangunan Industri o UPTD RPK
								Penjelasan Progres: Triwulan I 5,830 Jumlah Capaian = 5,830			
2	Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Perdagangan	Nilai Lapangan Usaha Perdagangan	Triliyun (Rp)	16,150	3,500	4,264	121,83%	<ul style="list-style-type: none"> o Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan o Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan o Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting o Program Pengembangan Ekspor o Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen o Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri o Program Standardisasi dan Perlindungan 	121,83%	0,18%	<ul style="list-style-type: none"> o Bidang Sarana Perdagangan dan Pengembangan Ekspor o Bidang Pengendalian Perdagangan dan Perlindungan Konsumen o UPTD BPSMB o UPTD RPK
TRIWULAN IV											

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2024	TERGET KINERJA TW I	REALISASI KINERJA TW I (%)	PERSENTASE CAPAIAN TW I	PENJELASANAN PROGRES TW I	PERSENTASE CAPAIAN s.d. TW I	PERSENTASE REALISASI ANGGARAN TW I	PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Konsumen (BPSMB) o Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (RPK)			
								Penjelasan Progres: Triwulan I 4,264 Jumlah Capaian = 4,264			

(*) Sumber: Potret Perekonomian Makro Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan I-2025
Volume 4, Nomor 2, 2025

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Drs. H. TARMIN , M.Si
196811111990091001



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. Pulau Bangka Kompleks Perkantoran dan Pemukiman Terpadu
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kelurahan Air Itam Pangkalpinang 33148
Telp/Faks : (0717) 439093, Email : perindag@babelprov.go.id, Website :
<http://perindag.babelprov.go.id>

BERITA ACARA

Nomor : BA-033/DISPERINDAG/TW II/2025

Pada hari ini Rabu, tanggal delapan belas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh lima, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan penyusunan Laporan Monev Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2025 (terlampir).

Demikian Berita Acara Validasi Laporan Monev Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2025 dibuat dengan sesungguhnya dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Pangkalpinang
Pada tanggal 18 Juli 2025

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Drs. H. TARMIN , M.Si
196811111990091001

**MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI KINERJA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2025	TRIWULAN IV						PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
					TERGET KINERJA TW II	REALISASI KINERJA TW II (C)	PERSENTASE CAPAIAN TW II	PENJELASANAN PROGRES TW II	PERSENTASE CAPAIAN s.d. TW II	PERSENTASE REALISASI ANGGARAN TW II	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan	Nilai Lapangan Usaha Industri Pengolahan	Triliyun (Rp)	22,300	4,000	6,17	154,25%	<ul style="list-style-type: none"> o Program Perencanaan dan Pembangunan Industri o Program Pengendalian Izin Usaha Industri o Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional o Program Perencanaan dan Pembangunan Industri (RPK) 	150,00%	21,81%	<ul style="list-style-type: none"> o Bidang Pengendalian dan Fasilitasi Usaha Industri o Bidang Perencanaan dan Pembangunan Industri o UPTD RPK
								Penjelasan Progres: Triwulan I 5,830 Triwulan II 6,170 Jumlah Capaian = 12,000			
2	Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Perdagangan	Nilai Lapangan Usaha Perdagangan	Triliyun (Rp)	16,700	3,000	4,503	150,10%	<ul style="list-style-type: none"> o Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan o Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan o Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting o Program Pengembangan Ekspor o Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen o Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri o Program Standardisasi dan Perlindungan 	134,87%	21,47%	<ul style="list-style-type: none"> o Bidang Sarana Perdagangan dan Pengembangan Ekspor o Bidang Pengendalian Perdagangan dan Perlindungan Konsumen o UPTD BPSMB o UPTD RPK
TRIWULAN IV											

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2024	TERGET KINERJA TW II	REALISASI KINERJA TW II (%)	PERSENTASE CAPAIAN TW II	PENJELASANAN PROGRES TW II	PERSENTASE CAPAIAN s.d. TW II	PERSENTASE REALISASI ANGGARAN TW II	PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Konsumen (BPSMB) o Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (RPK)			
								Penjelasan Progres: Triwulan I 4,264 Triwulan II 4,503 Jumlah Capaian = 8.767			

(*) Sumber: Potret Perekonomian Makro Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan II-2025
Volume 4, Nomor 3, 2025

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Drs. H. TARMIN , M.Si
196811111990091001



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

JL. Pulau Bangka Kompleks Perkantoran dan Pemukiman Terpadu
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kelurahan Air Itam Pangkalpinang 33148
Telp/Faks : (0717) 439093, Email : perindag@babelprov.go.id, Website :
<http://perindag.babelprov.go.id>

BERITA ACARA

Nomor : BA-043/DISPERINDAG/TW III/2025

Pada hari ini Rabu, tanggal tujuh belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh lima, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan penyusunan Laporan Monev Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2025 (terlampir).

Demikian Berita Acara Validasi Laporan Monev Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2025 dibuat dengan sesungguhnya dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Pangkalpinang
Pada tanggal 17 Oktober 2025

Plt. KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



YENNI ASMITA, S.Pd.I, M.M
198005042000032002

**MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI KINERJA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2025	TRIWULAN IV						PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
					TERGET KINERJA TW III	REALISASI KINERJA TW III (C)	PERSENTASE CAPAIAN TW III	PENJELASANAN PROGRES TW III	PERSENTASE CAPAIAN s.d. TW III	PERSENTASE REALISASI ANGGARAN TW III	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan	Nilai Lapangan Usaha Industri Pengolahan	Triliyun (Rp)	22,300	8.500	6,08	71,53%	<ul style="list-style-type: none"> o Program Perencanaan dan Pembangunan Industri o Program Pengendalian Izin Usaha Industri o Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional o Program Perencanaan dan Pembangunan Industri (RPK) 	109,57%	77,20%	<ul style="list-style-type: none"> o Bidang Pengendalian dan Fasilitasi Usaha Industri o Bidang Perencanaan dan Pembangunan Industri o UPTD RPK
								Penjelasan Progres: Triwulan I 5,830 Triwulan II 6,170 Triwulan III 6,080 Jumlah Capaian = 18,080			
2	Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Perdagangan	Nilai Lapangan Usaha Perdagangan	Triliyun (Rp)	16,700	6,200	4,450	71,77%	<ul style="list-style-type: none"> o Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan o Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan o Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting o Program Pengembangan Ekspor o Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen o Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri o Program Standardisasi dan Perlindungan 	104,07%	45,13%	<ul style="list-style-type: none"> o Bidang Sarana Perdagangan dan Pengembangan Ekspor o Bidang Pengendalian Perdagangan dan Perlindungan Konsumen o UPTD BPSMB o UPTD RPK

TRIWULAN IV										
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2024	TERGET KINERJA TW III	REALISASI KINERJA TW III (*)	PERSENTASE CAPAIAN TW III	PENJELASANAN PROGRES TW III	PERSENTASE CAPAIAN s.d. TW III	PERSENTASE REALISASI ANGGARAN TW III	PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Konsumen (BPSMB) o Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (RPK)			
								Penjelasan Progres: Triwulan I 4,264 Triwulan II 4,503 Triwulan III 4,450 Jumlah Capaian = 13,217			

(*) Sumber: Potret Perekonomian Makro Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan II-2025
Volume 4, Nomor 4, 2025

Plt. KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



YENNI ASMITA, S.Pd.I, M.M
198005042000032002



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. Pulau Bangka Kompleks Perkantoran dan Pemukiman Terpadu
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kelurahan Air Itam Pangkalpinang 33148
Telp/Faks : (0717) 439093, Email : perindag@babelprov.go.id, Website :
<http://perindag.babelprov.go.id>

BERITA ACARA

Nomor : BA-012/DISPERINDAG/TW IV/2026

Pada hari ini Rabu, tanggal dua belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh enam, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan penyusunan Laporan Monev Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2025 (terlampir).

Demikian Berita Acara Validasi Laporan Monev Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2025 dibuat dengan sesungguhnya dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Pangkalpinang
Pada tanggal 12 Februari 2026

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



SUBEKTI SAPUTRA, S.TP., M.M.
198307292009031003

**MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI KINERJA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2025	TRIWULAN IV						PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
					TERGET KINERJA TW III	REALISASI KINERJA TW III (C)	PERSENTASE CAPAIAN TW III	PENJELASANAN PROGRES TW III	PERSENTASE CAPAIAN s.d. TW III	PERSENTASE REALISASI ANGGARAN TW III	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan	Nilai Lapangan Usaha Industri Pengolahan	Triliyun (Rp)	22,300	5,650	6,612	117,02%	<ul style="list-style-type: none"> o Program Perencanaan dan Pembangunan Industri o Program Pengendalian Izin Usaha Industri o Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional o Program Perencanaan dan Pembangunan Industri (RPK) 	110,73%	86,82%	<ul style="list-style-type: none"> o Bidang Pengendalian dan Fasilitasi Usaha Industri o Bidang Perencanaan dan Pembangunan Industri o UPTD RPK
								Penjelasan Progres: Triwulan I 5,830 Triwulan II 6,170 Triwulan III 6,080 Triwulan IV 6,612 Jumlah Capaian = 24,692			
2	Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Perdagangan	Nilai Lapangan Usaha Perdagangan	Triliyun (Rp)	16,700	3,850	5,069	131,66%	<ul style="list-style-type: none"> o Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan o Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan o Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting o Program Pengembangan Ekspor o Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen o Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri o Program Standardisasi dan Perlindungan 	109,50%	87,37%	<ul style="list-style-type: none"> o Bidang Sarana Perdagangan dan Pengembangan Ekspor o Bidang Pengendalian Perdagangan dan Perlindungan Konsumen o UPTD BPSMB o UPTD RPK

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2024	TRIWULAN IV					PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)	
					TERGET KINERJA TW IV	REALISASI KINERJA TW IV (%)	PERSENTASE CAPAIAN TW IV	PENJELASANAN PROGRES TW IV	PERSENTASE CAPAIAN s.d. TW IV		PERSENTASE REALISASI ANGGARAN TW IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Konsumen (BPSMB) o Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (RPK)			
								Penjelasan Progres: Triwulan I 4,264 Triwulan II 4,503 Triwulan III 4,450 Triwulan IV 5,069 Jumlah Capaian = 18,286			

(*) Sumber: Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan IV-2025
BRS No. 12/02/19/Th. XXIV, 5 Februari 2026

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



SUBEKTI SAPUTRA, S.TP., M.M.
198307292009031003



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

INSPEKTORAT DAERAH

KOMPLEKS PERKANTORAN DAN PERUMAHAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEC. BUKIT INTAN KEL. AIR ITAM TEL/FAX. (0717) 434693, 439313 – PANGKALPINANG

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2024**

NOMOR : 700/117/LHE-ITDA/2025

TANGGAL : 23 MEI 2025



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
INSPEKTORAT DAERAH

KOMPLEKS PERKANTORAN DAN PERUMAHAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEC. BUKIT INTAN KEL. AIR ITAM TEL/FAX. (0717) 434693, 439313 – PANGKALPINANG

Pangkalpinang, 23 Mei 2025

Nomor : 700/117 /LHE/ITDA/2025
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP) Dinas
Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2024

Yth. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
di - Pangkalpinang

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Surat Tugas Plt. Inspektur a.n. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung 700/19/REV-ITDA/2025 tanggal 11 Maret 2025 hal melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan evaluasi atas implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 dengan tujuan:
 - a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
 - c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
 - d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan SAKIP; dan
 - e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.
2. Ruang lingkup evaluasi
Ruang lingkup evaluasi SAKIP dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja, yang meliputi:
 - a. Perencanaan Kinerja;
 - b. Pengukuran Kinerja;
 - c. Pelaporan Kinerja; dan
 - d. Evaluasi AKIP.

3. Metodologi dan Teknik Evaluasi

- Metodologi evaluasi SAKIP dilakukan dengan cara kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan);
- Teknik evaluasi yang digunakan, antara lain checklist pengumpulan data informasi, komunikasi melalui Aplikasi E SAKIP, tanya dan jawab sederhana, observasi, studi dokumentasi.

4. Hasil Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan terhadap Dokumen Perencanaan Kinerja yang terdiri dari Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ) Tahun 2024, serta dokumen terkait lainnya.

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan nilai sebesar 76,90 dengan predikat BB. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "Sangat Baik" yaitu terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu pada unit kerja utama maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai dengan level eselon 3/koordinator. Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai Tahun 2023	Nilai Tahun 2024
a.	Perencanaan Kinerja	30	24,60	24,60
b.	Pengukuran Kinerja	30	23,10	23,10
c.	Pelaporan Kinerja	15	10,95	12,45
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	15,50	16,75
	Nilai Hasil Evaluasi	100	74,50	76,90
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB
	Interpretasi : Sangat Baik			

Nilai sebagaimana tersebut di atas, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja dan capaian kinerja pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

Evaluasi terhadap perencanaan kinerja dengan bobot 30% dari 100% komponen manajemen kinerja yang dievaluasi meliputi penilaian atas dokumen perencanaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang meliputi Dokumen Perencanaan Kinerja telah tersedia, Dokumen Perencanaan Kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) di setiap level secara logis, dan Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan. Evaluasi terhadap perencanaan kinerja mendapatkan nilai 24,60 dari bobot 30,00 yang ditunjukkan dengan kondisi sebagai berikut:

berkesinambungan. Evaluasi terhadap perencanaan kinerja mendapatkan nilai 24,60 dari bobot 30,00 yang ditunjukkan dengan kondisi sebagai berikut:

1) Keberadaan

Hasil evaluasi terhadap ketersediaan dokumen perencanaan kinerja yaitu pemenuhan dokumen berupa pedoman teknis perencanaan kinerja, Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) mendapat nilai 5,40 dari bobot 6,00.

2) Kualitas

Hasil evaluasi terhadap kualitas dokumen Perencanaan Kinerja menunjukkan telah memenuhi standar yang baik dengan nilai 7,20 dari bobot 9,00 dengan uraian sebagai berikut:

- a) Dokumen Perencanaan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah diformalkan dan dipublikasikan tepat waktu;
- b) Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu;
- c) Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai;
- d) Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai;
- e) Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART;
- f) Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis);
- g) Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis;
- h) Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading);
- i) Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting);
- j) Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja;
- k) Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.

3) Pemanfaatan

Hasil evaluasi terhadap pemanfaatan dokumen perencanaan dengan nilai 12,00 dari bobot 15,00, hal ini menunjukkan bahwa dokumen perencanaan telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan, dengan uraian sebagai berikut:

- a) Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai;
- b) Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai;
- c) Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih on the right track;
- d) Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala;

- e) Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya;
- f) Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik;
- g) Setiap unit/satuan kerja (Sekretariat/Bidang/Bagian) memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan;
- h) Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.

b. Pengukuran Kinerja

Evaluasi terhadap pengukuran kinerja dengan bobot 30% dari 100% komponen manajemen kinerja yang dievaluasi meliputi pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja.

Evaluasi terhadap pengukuran kinerja mendapatkan nilai 23,10 dari bobot 30,00 yang ditunjukkan dengan kondisi sebagai berikut:

1) Keberadaan

Hasil evaluasi terhadap ketersediaan dokumen pengukuran kinerja dengan nilai 5,40 dari bobot 6,00, hal ini menunjukkan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah memiliki pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja dengan cara mengukur indikator kinerja (formula) dan telah memiliki mekanisme pengumpulan data kinerja dalam Standar Operasional Prosedur.

2) Kualitas

Hasil evaluasi terhadap kualitas pengukuran kinerja dengan nilai 7,20 dari bobot 9,00, dengan uraian sebagai berikut

- a) Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja. Namun belum terlaksananya monitoring dan evaluasi capaian kinerja pertriwulan;
- b) Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan;
- c) Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan;
- d) Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala;
- e) Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang;
- f) Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi);
- g) Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).

3) Pemanfaatan

Hasil evaluasi terhadap pemanfaatan pengukuran kinerja dengan nilai 10,50 dari bobot 15,00, hal ini menunjukkan bahwa:

- a) Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan;
- b) Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional;
- c) Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi;
- d) Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja;
- e) Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja;
- f) Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja;
- g) Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja;
- h) Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja;
- i) Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja, namun tidak terdokumentasinya LKJP, screen shoot publikasi pada website serta survey pemahaman dan kepedulian;
- j) Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja, namun tidak terdokumentasinya viewer pada website, kehadiran sosialisasi maupun survey pemahaman dan kepedulian.

c. Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja dengan bobot penilaian sebesar 15% dari total 100% komponen manajemen kinerja yang dievaluasi, bahwa pelaporan kinerja telah menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta ada upaya untuk perbaikan/penyempurnaan kinerja yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja. Evaluasi terhadap laporan kinerja mendapatkan nilai 12,45 dari bobot 15,00, yang ditunjukkan dengan kondisi sebagai berikut:

1) Keberadaan

Hasil evaluasi terhadap laporan kinerja dengan nilai 2,40 dari bobot 3,00, hal ini menunjukkan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menyusun dokumen laporan kinerja yang disusun secara berkala, telah diformalkan, dan disampaikan secara tepat waktu dan disampaikan secara tepat waktu, serta telah dipublikasikan dalam Aplikasi e-SAKIP.

2) Kualitas

Hasil evaluasi terhadap kualitas laporan kinerja dengan nilai 4,05 dari bobot 4,50, hal ini menunjukkan bahwa Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkualitas sesuai standar, mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja, menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya,

menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional (Benchmark Kinerja), menginformasikan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya, menginformasikan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja, menginformasikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan.

3) Pemanfaatan

Hasil evaluasi terhadap kualitas laporan kinerja dengan nilai 6,00 dari bobot 7,50 hal ini menunjukkan bahwa Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas. Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja, Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya, Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi. Namun Pelaporan Kinerja belum terdokumentasi Notulen Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai.;

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Evaluasi atas komponen Evaluasi Kinerja dengan bobot penilaian sebesar 25% dari total 100% komponen manajemen kinerja yang dievaluasi berupa evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja dan dapat memberikan simpulan hasil penilaian beberapa variabel, antara lain kriteria-kriteria yang ada dalam penerapan komponen-komponen manajemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagai fakta obyektif instansi pemerintah/unit kerja mengimplementasikan SAKIP. Evaluasi terhadap evaluasi kinerja mendapatkan nilai 16,75 dari bobot 25,00, yang ditunjukkan dengan kondisi sebagai berikut:

1) Keberadaan

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan nilai 3,50 dari bobot 5,00, hal ini menunjukkan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang dijadikan standar untuk melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.

2) Kualitas

Hasil evaluasi atas kualitas akuntabilitas kinerja internal dengan nilai 4,50 dari bobot 7,50, hal ini menunjukkan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar, namun belum terdokumentasi, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan oleh SDM yang memadai karena tidak adanya

evaluasi bersertifikasi. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal tidak dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai.

3) Pemanfaatan

Hasil evaluasi atas kualitas akuntabilitas kinerja internal dengan nilai 8,75 dari bobot 12,50, hal ini menunjukkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum sepenuhnya memanfaatkan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja internal untuk perbaikan dan peningkatan Akuntabilitas Kinerja.

5. Rekomendasi

Terhadap permasalahan yang telah diuraikan di atas, kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kedepannya melakukan perbaikan terhadap SAKIP agar:

- a. Setiap unit /Satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan;
- b. Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang;
- c. Mendapatkan pelaporan kinerja dari masing-masing bidang;
- d. Mendokumentasikan seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan;
- e. Menindaklanjuti laporan hasil evaluasi Kementerian Penndayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi terkait pelaporan kinerja yang belum memuat informmasi strategi perbaikan kedepan.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya Saudara beserta jajaran dalam menerapkan SAKIP secara utuh di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai bagian dari penerapan Reformasi Birokrasi.

Pit. INSPEKTUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



IMAM KUSNADI, S.E., M.A.B., CfrA., CRGP., CGCAE
Pembina Tk. I
NIP. 197506092008121001

Tembusan:

- 1) Menteri PAN dan RB;
- 2) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

EVALUASI AKIP 2024
DINASPERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Provinsi kepulauan bangka belitung

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit Kerja			Saran	Daftar Evidence yang mungkin	Link Pendukung Pertanyaan
			Jawaban	Nilai	Jawaban			
1	PERENCANAAN KINERJA	30,00		24,60		%		
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	A	5,40				
Kriteria:						90,00		
1	Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja.				A	90	Ada atau tidaknya pedoman perencanaan kinerja versi instansi? Tidak hanya renstra tetapi juga yang tahunan	Pergub 54 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP Prov. Kep. Babel. https://drive.google.com/drive/folders/1l3waC-Pf6SUAQdMV6rTvAzet1kFyIu5?usp=drive_link
2	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka Panjang				A	90	Jelas	Perda Nomor 8 Tahun 2024 Tentang RPIPD Prov. Kep. Babel Tahun 2025 s.d. 2045 https://drive.google.com/drive/folders/1k_nypcTM2BBEJH7A-Hq8PiuU9Q-ZO-Q?usp=drive_link
3	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka Menengah				A	90	Perencanaan tahunan yang telah berisi kinerja yang ingin dicapai per tahun itu berdasarkan renstra., Isunya, perencanaan program dan kegiatannya, dan sumber dayanya. Perlu adanya pernyataan/cerita bahwa perencanaan tahunan (PK, renja, RKAKL, dan renaksi) walaupun terpisah-pisah tapi perlu dipastikan keterhubungannya	Renstra OPD https://drive.google.com/drive/folders/1UksGFteFRMw8SkZ5Y7_540_N8cGZ9DIT?usp=drive_link
4	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka Pendek				A	90	Cukup di level unit pelaksana aktivitas. Perlu dinyatakan bahwa aktivitas yang direncanakan sudah mendukung kinerja tahunan yang akan dicapai.	Renja OPD https://drive.google.com/drive/folders/1-mj_mFSNm2aMjmYsvV1Kzixe9Fj2lDX?usp=drive_link
5	Terdapat dokumen perencanaan aktifitas yang mendukung kinerja.				A	90	Sambungan penjelasan dari dokumen perencanaan kinerja jangka pendek (tahunan). Ada penjelasan program-program dan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian IKU	PK OPD https://drive.google.com/drive/folders/1nN5por3MCQduVNSz5HKQeQgl5NoR8a1yD?usp=drive_link
6	Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja				A	90,00	Jelas	DPA https://drive.google.com/drive/folders/1o1Tw_0neeKpRS2QgVRywiG2zrQar2L7R?usp=drive_link
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9,00	BB	7,20				
Kriteria:						83,64		
1	Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan.				A	90	perencanaan kinerja sudah formal berarti pimpinan sudah bertanggung jawab atas keberhasilan perencanaan tersebut	RPIPD, Renstra OPD, Renja OPD, PK OPD, dan DPA yang telah ditetapkan (nomor, ttd dan stempel) https://drive.google.com/drive/folders/1bl_wNlcITD1QTYoPAst1z44pNiykYaU1Q?usp=drive_link
2	Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu.				A	90	jelas	Screen shoot bukti upload melalui website OPD maksimal 1 bulan setelah disahkan https://drive.google.com/drive/folders/1YGwzVRTcOVAAMplBb9deR3IKINrXE9?usp=drive_link
3	Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai.				A	90	Penjelasan keselarasan perencanaan kinerja dengan perencanaan kinerja yang lebih tinggi levelnya (sasaran, IKU, outcome s.d. output) dari sisi kinerja dan target serta isu strategis	Bab II dan III Renstra, Pohon kinerja (cascading), perbandingan bab kinerja dan isu strategis https://drive.google.com/drive/folders/148WM4UuHim_ICyYBwwW0c4_TAm2uXCg?usp=drive_link

4	Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi	A	90	definisi kinerja sudah menjelaskan kondisi yang ingin dicapai atau	Tabel Lampiran Renstra(form e27-e29),	https://drive.google.com/drive
5	Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART.	BB	80	Indikator cukup untuk menggambarkan kondisi yang ingin dicapai	Dokumen IKU, Manual Indikator	https://drive.google.com/drive
6	Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang	BB	80	Jelas	Dokumen IKU, kertas kerja evaluasi	https://drive.google.com/drive
7	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable),	BB	80	Pernyataan atau cerita bahwa rumusan target sudah		https://drive.google.com/drive
8	Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang	BB	80	Pernyataan bahwa perencanaan kinerja sudah berdasarkan	Cascading kinerja sampai dengan level	https://drive.google.com/drive
9	Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja,	BB	80	Penjelasan kinerja (sendiri atau tingkat atasnya) berhubungan	Crosscutting pohon kinerja atas tujuan	https://drive.google.com/drive
10	Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.	BB	80		PK berjenjang	https://drive.google.com/drive
11	Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.	BB	80		PK, IKI dan SKP	https://drive.google.com/drive
1.c	Perencanaan Kinerja telah	15,00	BB	12,00		
Kriteria:				80,00		
1	Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai.	BB	80	Penjelasan bahwa tiap program dan kegiatan yang dianggarkan	DPA dan PK	https://drive.google.com/drive
2	Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai.	BB	80	Jelas	DPA, PK dan Rencana Aksi	https://drive.google.com/drive
3	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik,	BB	80	Penjelasan bahwa rencana aksi telah dipantau dan disesuaikan terus	Capaian Indikator Sasaran Tahun	https://drive.google.com/drive
4	Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu	BB	80	Penjelasan bahwa dokumen perencanaan saat ini sudah	Rapat evaluasi triwulan capaian kinerja	https://drive.google.com/drive
5	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang	BB	80	Kinerja ditargetkan lebih baik, tapi bisa disamakan dengan nomor 4	Laporan Monev, Renja Perubahan, dan	https://drive.google.com/drive
6	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam	BB	80	Seluruh unit kerja telah menyusun rencana aksi yang mendukung	Laporan Monev, Renja Perubahan dan PK	https://drive.google.com/drive
7	Setiap unit/satuan kerja (Sekretariat/Bidang/Bagian) memahami dan peduli, serta	BB	80	Penjelasan bahwa pengambilan keputusan strategis dilakukan oleh	Laporan Monev, Rencana Aksi dan	https://drive.google.com/drive
8	Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai	BB	80	Pemantauan kinerja/output pegawai sudah menunjukkan hasil yang	PK berjenjang, IKI dan SKP	https://drive.google.com/drive
2	PENGUKURAN KINERJA	30,00		23,10		
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00	A	5,40		
Kriteria:				90,00		
1	Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.	A	90	pedoman dan SOP pengumpulan data dan pengukuran kinerja	Penyelenggaraan sistem akuntabilitas	/folders/1XKEva7vRc_IFPRAjd
2	Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur	A	90	1. Sudah adanya sasaran yang jelas terlihat indikator yang bisa	SK IKU dan penjelasannya	https://drive.google.com/drive
3	Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat	A	90	Ada SOP, Sumber data dan cara pengumpulan yang memastikan data	Penyelenggaraan sistem akuntabilitas	/folders/1zMGQWrtEJQI4mTL
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi	9,00	BB	7,20		
Kriteria:				80,00		
1	Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam	BB	80	Data kinerja yang dikumpulkan sesuai dengan metodologi dan	(undangan/nodin, daftar hadir, foto,	/folders/1YkVW8pTy_0kxPR5XF
2	Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja	BB	80	Pernjelasan keandalan data	LAKIP OPD dan laporan capaian kinerja	https://drive.google.com/drive
3	Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang	BB	80	Jelaskan frekuensinya	LAKIP OPD dan laporan capaian kinerja	/folders/1yEaaOnyXQEkRxpQI
4	Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala.	BB	80	Penjelasan bahwa monev dilakukan berjenjang dan buktinya	LAKIP OPD dan laporan capaian kinerja	PxivRkzp12i3uac?usp=drive_lin
5	Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja	BB	80	Jelaskan aplikasinya jika ada meskipun hanya googleform	1. SS E- kinerja perbulan yang sudah	https://drive.google.com/drive
6	Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan	BB	80		1. SS E- kinerja perbulan yang sudah	/folders/1RGAxXooXGg_RU8np
7	Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).	BB	80		1. SS E- kinerja perbulan yang sudah	aED5NQAe7CN41FhK?usp=driv
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan	15,00	B	10,50		
Kriteria:				78,00		
1	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian	BB	80,00	Penjelasan bahwa hasil pengukuran kinerja menjadi dasar pemberian	PerGub TPP dan screenshot e-kinerja	https://drive.google.com/drive
2	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan	BB	80	Penjelasan bahwa dari hasil pengukuran kinerja diketahui bahwa ada	perGub tentang Penyusunan profil	https://drive.google.com/drive
3	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi.	BB	80		Pelaksanaan ABK dan ANJAB dan	https://drive.google.com/drive
4	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai	BB	80	Misalnya dari hasil pengukuran diperoleh hasil kinerja yang tinggi	2. Capaian rencana aksi triwulanan	https://drive.google.com/drive
5	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam	BB	80		2. Capaian rencana aksi triwulanan	/folders/1AatoVGO7n0stHp3B2
6	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai	BB	80		2. Capaian rencana aksi triwulanan	abzyl_mZ_x48DfBl?usp=drive_l
7	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam	BB	80		1. Dokumen Renja Perubahan dan	https://drive.google.com/drive
8	Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.	BB	80	Pastikan bahwa pelaksanaan kegiatan untuk mencapai kinerja sudah	1. Dokumen DPA/DPPA	https://drive.google.com/drive
9	Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.	B	70	Penjelasan apakah pengukuran kinerja dilakukan berjenjang dan hasil	dan SS publikasi di website, Survei	/folders/1oFhd_1zTUHF1x64TRZ
10	Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.	B	70		sosialisasi, Survei Pemahaman dan	/folders/1u0lFgvVooKtUuUO1K
3	PELAPORAN KINERJA	15,00		12,45		
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang	3,00	BB	2,40		
Kriteria:				86,67		
1	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun.	A	90	Jelas	LKJ OPD dan SK Tim Penyusun LKJ	/folders/1yLhNAGH604tIMUN
2	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala.	A	90	Jelas, tetapi dijelaskan frekuensinya	Laporan Capaian Kinerja	https://drive.google.com/drive
3	Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan.	A	90		LKJ OPD yg sudah disahkan	/folders/1tCeJL5Z9MKbP13aiZh
4	Dokumen Laporan Kinerja telah direvisi.	BB	80	Jelas	Revisi berjenjang penyusunan LKJ dari	https://drive.google.com/drive

5	Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan.	A	90,00	dipublish ke publik bukan ke esr	Upload LKJ OPD pada alamat website	https://drive.google.com/drive
6	Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu.	BB	80	disahkan dan disampaikan ke stakeholder terdekat secara tepat	Tanggal SS di Aplikasi E-SR	https://drive.google.com/drive
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah	4,50	A	4,05		
Kriteria:				90,00		
1	Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar.	A	90	Jelas	LKJIP OPD sesuai Permenpan 53 Tahun 2014	https://drive.google.com/drive/folders/1VeqtweC49f8ZGmby-kt9B-WL-zfABB71?usp=drive_link
2	Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja.	A	90	Sesuai standar yang ditentukan instansi atau jika belum ada bisa berpedoman langsung pada Peraturan Menpan 53 Tahun 2014	LKJIP OPD sesuai Permenpan 53 Tahun 2014	
3	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan.	A	90	Pernyataan berupa persen kinerja yang diperjanjikan yang telah masuk dalam laporan kinerja	LKJIP OPD sesuai Permenpan 53 Tahun 2014	
4	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah.	A	90	Jelas	LKJIP OPD sesuai Permenpan 53 Tahun 2014	
5	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.	A	90	Jelas	LKJIP OPD sesuai Permenpan 53 Tahun 2014	
6	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).	A	90	Jelas, tetapi jika ada	LKJIP OPD sesuai Permenpan 53 Tahun 2014	
7	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.	A	90	Jelas	LKJIP OPD sesuai Permenpan 53 Tahun 2014	
8	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.	A	90	Jelas	LKJIP OPD sesuai Permenpan 53 Tahun 2014	
9	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).	A	90	Jelas, gunakan informasi dari hasil pengukuran di poin (2.c.9)	LKJIP OPD sesuai Permenpan 53 Tahun 2014	
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan	7,50	BB	6,00		
Kriteria:				80,00		
1	Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan	BB	80	penjelasan apakah pimpinan memberikan atensi berupa persetujuan,	Notulensi yang berisi diantaranya	https://drive.google.com/drive
2	Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai.	BB	80	keandalan data dan penjelasan output/kinerja dikumpulkan perlu	1. Notulensi yang berisi diantaranya	https://drive.google.com/drive
3	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian	BB	80	Jelas	rencana aksi dan hasil rapat	https://drive.google.com/drive/folders/1oqbisUymM2uv9GQd
4	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian	BB	80	Jelas	LKIP Triwulanan pada BAB III (analisis	https://drive.google.com/drive
5	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian	BB	80	Jelas	LKIP Triwulanan pada BAB III	https://drive.google.com/drive
6	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian	BB	80	Jelas	LKIP pada BAB IV (rekomendasi/	https://drive.google.com/drive
7	Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja	BB	80	struktur penilaian untuk mendapat tukin, perubahan mekanisme	1. Laporan capaian IKU Tahun 2019 s/d	https://drive.google.com/drive
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA	25,00		16,75		
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5,00	B	3,50		
Kriteria:				76,67		
1	Terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.	BB	80	Jelas	Pergub Nomor 15 Tahun 2023 tentang	https://drive.google.com/drive
2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	BB	80	bisa evaluasi satu per satu unit dan direvlu berjenjang atau dilakukan	Triwulan	https://drive.google.com/drive/folders/1Q1e1Vl-IFB4IC23L7D
3	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.	B	70	Penjelasan penjenjangan evaluasi seperti apa sesuai mekanisme yang	Dokumen hasil evaluasi internal (LHE)	https://drive.google.com/drive
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	7,50	CC	4,50		
Kriteria:				66,00		
1	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar.	B	70	Jika ada routing slip, dihitung berapa persen tahap yang sudah sesuai	SOP Evaluasi Internal	https://drive.google.com/drive
2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang	B	70	Apakah evaluasi dilaksanakan oleh SDM yang telah memahami	Evaluator yang bersertifikasi	https://drive.google.com/drive
3	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman	CC	60	- Apabila seluruh komponen/kriteria dilakukan pendalaman yang	SK Tim Evaluasi Internal dan Dokumen	https://drive.google.com/drive
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan.	CC	60	Sama dengan poin 4.a.2. Jadi bisa dihapus	Dokumen hasil evaluasi internal (LHE)	https://drive.google.com/drive
5	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan	B	70	Jelas	Screen shoot aplikasi E-SAKIP hasil	https://drive.google.com/drive
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat	12,50	B	8,75		
Kriteria:				70,00		
1	Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah	B	70	1. Apakah rekomendasi telah ditindaklanjuti? Berapa persen?	Bukti tidak lanjut rekomendasi evaluasi	https://drive.google.com/drive
2	Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak	B	70		LHE Tahun sebelumnya dan Renaksi/ dan	https://drive.google.com/drive
3	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan	B	70		LHE Tahun sebelumnya dan Renaksi/ dan	https://drive.google.com/drive
4	Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam	B	70		LHE Tahun sebelumnya dan Renaksi/ dan	https://drive.google.com/drive
5	Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil	B	70		LHE Tahun sebelumnya dan Renaksi/ dan	https://drive.google.com/drive
				76,90		



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kelurahan Air Itam Pangkalpinang
33148

Telp/Faks : (0717)439093; Email : perindag@babelprov.go.id; website : <http://perindag.babelprov.go.id>

Pangkalpinang, 02 September 2025

Nomor : 000.7/0827/DISPERINDAG-I
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Penyampaian Tindak Lanjut Rekomendasi LHE SAKIP

Kepada

Yth. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
di Tempat

Menindaklanjuti Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2024 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 700/117/LHE/ITDA/2025, dengan ini disampaikan Rencana Aksi Tindak Lanjut Rekomendasi LHE SAKIP sebagaimana arahan dan rekomendasi yang diberikan.

Adapun dokumen yang kami sampaikan berupa:

1. Rencana Aksi Tindak Lanjut Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2024;
2. Bukti dukung capaian kinerja yang telah dikompilasi dari masing-masing bidang/UPT beserta link google drive;
3. Dokumen pendukung lainnya beserta link google drive.

Dokumen ini kami sampaikan sebagai bentuk komitmen Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja serta mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Demikian surat pengantar ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas,



Drs. H. TARMIN , M.Si
196811111990091001

RENCANA AKSI TINDAK LANJUT REKOMENDASI LHE SAKIP
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2025

No	Rekomendasi LHE SAKIP	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Rencana Waktu Pelaksanaan	Status/Progres Penyelesaian	Realisasi				Bukti Dukung
						Tw 1	Tw 2	Tw 3	Tw 4	
1	Setiap unit/satuan kerja memahami, peduli, serta berkomitmen terhadap pencapaian kinerja	Melaksanakan rapat internal evaluasi SAKIP per triwulan	1 Kegiatan	Juli 2025	Selesai			V		Notulen, daftar hadir rapat https://drive.google.com/drive/folders/1s0p_2Va1tmK1r006lDt0OgE4ctDs_BAS?usp=sharing
2	Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja secara berjenjang	Menyusun jadwal monitoring & evaluasi capaian kinerja per triwulan, dengan laporan ke pimpinan	1 Laporan	Juli 2025	Selesai			V		Laporan Monev, rekap capaian indicator https://drive.google.com/drive/folders/1s0p_2Va1tmK1r006lDt0OgE4ctDs_BAS?usp=sharing
3	Mendapatkan pelaporan kinerja dari masing-masing bidang	Menetapkan format laporan kinerja triwulanan tiap bidang dan mengupload ke folder drive bersama	1 Laporan	Juli 2025	Selesai			V		Surat Permintaan Bukti Dukung SAKIP 2025 https://drive.google.com/drive/folders/1s0p_2Va1tmK1r006lDt0OgE4ctDs_BAS?usp=sharing

No	Rekomendasi LHE SAKIP	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Rencana Waktu Pelaksanaan	Status/Progres Penyelesaian	Realisasi				Bukti Dukung
						Tw 1	Tw 2	Tw 3	Tw 4	
4	Mendokumentasikan seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan	Membuat bank data dokumen (foto, laporan, notulen, SK, publikasi) berbasis cloud drive	1 Laporan	Juli 2025	Selesai			V		Surat Permintaan Dokumen Kegiatan 2025 https://drive.google.com/drive/folders/1s0p_2Va1tmK1r006lDt00gE4ctDs_BAS?usp=sharing
5	Menindaklanjuti evaluasi KemenPAN-RB terkait pelaporan kinerja yang belum memuat informasi strategi perbaikan	Menambahkan Subbab khusus “Strategi Perbaikan” dalam LKjIP 2025	1 Laporan	Agustus 2025	Selesai			V		Draft LKjIP dengan tambahan Subbab Strategi Perbaikan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2025 https://drive.google.com/drive/folders/1s0p_2Va1tmK1r006lDt00gE4ctDs_BAS?usp=sharing

KEPALA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



Drs. H. TARMIN , M.Si
196811111990091001



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kelurahan Air Itam Pangkalpinang 33148
Telp/Faks : (0717)439093; Email : perindag@babelprov.go.id; website : <http://perindag.babelprov.go.id>

Pangkalpinang, 29 Agustus 2025

Nomor : 000.7/0813/DISPERINDAG-I
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Bukti Dukung Capaian Kinerja Tahun 2025

Kepada

Yth. Sekretaris/ Kepala Bidang/ Kepala UPTD / Kasubbag/ Kepala Seksi/ Ketua Tim
Di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
di Tempat

Menindaklanjuti Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan untuk meningkatkan penerapan SAKIP di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Agar setiap unit Sekretariat/ Bidang/ UPTD untuk memahami, peduli, serta berkomitmen terhadap pencapaian kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dan setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja secara berjenjang.
2. Mengumpulkan dan menyampaikan Bukti Dukung Capaian Kinerja sesuai dengan Target dan Realisasi Rencana Aksi Daerah – Pengendalian dan Evaluasi Tahun 2025.
3. Untuk segera mengumpulkan dan menyampaikan Bukti Dukung Realisasi Rencana Aksi Daerah – DALEV Triwulan 1 dan Triwulan 2 selambatnya tanggal 8 September 2025 sebagai kelengkapan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024 dan mempersiapkan Bukti Dukung Triwulan 3 untuk menyusun Laporan DALEV Triwulan 3 selambatnya tanggal 30 September 2025.
4. Bukti Dukung dapat dikumpulkan melalui tautan google drive Capaian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 : <https://shorturl.at/pmf2a>
5. Mengumpulkan Dokumentasi Kegiatan Tahun 2025 yang telah dilaksanakan ke dalam tautan google drive Bank Data Dokumen Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 : <https://shorturl.at/wYIZO>
6. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tim Perencanaan Sdri. Ramayani, S. M. Sehubungan dengan hal tersebut, dimintakan komitmen bersama dalam mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja melalui SAKIP di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas,



Drs. H. TARMIN , M.Si
196811111990091001

No	Program	Indikator Kinerja Program	Target	REALISASI	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	REALISASI	SubKegiatan	Sasaran SubKegiatan	Indikator Kinerja SubKegiatan	Satuan	Target	Realisasi
									Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Laporan	TW 1 3 TW 2 7 TW 3 10 TW 4 14	TW 1 4 TW 2 7 TW 3 3 TW 4 4
					Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penetunaaan	Kinerja realisasi pupuk	TW 1 0 TW 2 0 TW 3 0 TW 4 90%	TW 1 0 TW 2 0 TW 3 0 TW 4 0	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi	Tersedianya Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi	Laporan	TW 1 1 TW 2 4 TW 3 7 TW 4 10	TW 1 1 TW 2 4 TW 3 3 TW 4 4
									Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Tersedianya Laporan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Laporan	TW 1 1 TW 2 4 TW 3 7 TW 4 10	TW 1 1 TW 2 4 TW 3 3 TW 4 4
Program Pengembangan Ekspor	Pertumbuhan Nilai Ekspor	TW 1 1% TW 2 3% TW 3 4% TW 4 5%	TW 1 4,37% TW 2 9,92%		Penyelenggaraan Promosi dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada lebih dari 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam	Jumlah Komoditi/Produk yang dipromosikan	TW 1 0 TW 2 0 TW 3 4 TW 4 4	TW 1 8 TW 2 8 TW 3 3 TW 4 4	Pameran Dagang Internasional/Nasional	Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pelaku Usaha	TW 1 0 TW 2 0 TW 3 0 TW 4 1	TW 1 0 TW 2 0 TW 3 0 TW 4 1
									Pameran Dagang Lokal	Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	Pelaku Usaha	TW 1 0 TW 2 0 TW 3 0 TW 4 0	TW 1 0 TW 2 0 TW 3 0 TW 4 0
									Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pelaksanaan Misi Dagang	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Pelaku Usaha	TW 1 0 TW 2 0 TW 3 0 TW 4 1	TW 1 0 TW 2 0 TW 3 0 TW 4 1
									Peningkatan Citra Produk Ekspor	Meningkatnya Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	Produk	TW 1 3 TW 2 6 TW 3 9 TW 4 12	TW 1 12 TW 2 12 TW 3 3 TW 4 4
Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Nilai Indeks Keberdayaan Konsumen	TW 1 0 TW 2 0 TW 3 0 TW 4 43	TW 1 0 TW 2 0 TW 3 0 TW 4 0		Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten kota	Penanganan pengaduan konsumen	TW 1 0 TW 2 0 TW 3 0 TW 4 100%	TW 1 0 TW 2 0 TW 3 0 TW 4 0	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Meningkatnya Keberdayaan dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	BPSK	TW 1 0 TW 2 0 TW 3 0 TW 4 1	TW 1 0 TW 2 0 TW 3 0 TW 4 1
									Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Meningkatnya Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen dalam Menyuarakan Aspirasi dan Memperjuangkan Hak Konsumen	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif	LPKSM	TW 1 0 TW 2 0 TW 3 0 TW 4 2	TW 1 0 TW 2 0 TW 3 0 TW 4 1
									Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Tersedianya Layanan Penanganan Pengaduan Konsumen	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	Pengaduan	TW 1 0 TW 2 0 TW 3 0 TW 4 43	TW 1 5 TW 2 10 TW 3 3 TW 4 4
											Jumlah laporan Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam aplikasi SIMPKTN	Laporan	TW 1 0 TW 2 0 TW 3 0 TW 4 0	TW 1 0 TW 2 0 TW 3 0 TW 4 0
					Pelaksanaan Pengawasan barang Beredar dan/ atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	TW 1 0 TW 2 0 TW 3 0 TW 4 93%	TW 1 0 TW 2 0 TW 3 0 TW 4 0	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan Sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Meningkatnya Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan Sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	Laporan	TW 1 3 TW 2 6 TW 3 9 TW 4 12	TW 1 3 TW 2 6 TW 3 3 TW 4 4
									Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Meningkatnya Penegakan Hukum di Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Jumlah Kasus yang Ditangani	Kasus	TW 1 0 TW 2 0 TW 3 0 TW 4 0	TW 1 0 TW 2 0 TW 3 0 TW 4 0
									Pengembangan Layanan Kalibrasi	Meningkatnya Layanan Kalibrasi	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	Sertifikat	TW 1 0 TW 2 0 TW 3 14 TW 4 0	TW 1 0 TW 2 0 TW 3 3 TW 4 4
									Pengembangan Layanan Pengujian	Meningkatnya Layanan Pengujian Mutu Barang	Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan	laporan	TW 1 3 (Laporan Pengujian) TW 2 6 (Laporan Pengujian April-Juni) TW 3 9 (Laporan Pengujian Juli-September) TW 4 12 (Laporan Pengujian Oktober-Desember)	TW 1 3 (Laporan Pengujian) TW 2 6 (Laporan Pengujian April-Juni) TW 3 3 TW 4 4
									Pemantauan Mutu Produk	Meningkatnya Kesesuaian Mutu Produk Terhadap Standar/persyaratan teknis yang berlaku	Jumlah produk potensial yang dipantau	Produk	TW 1 0 TW 2 0 TW 3 0 TW 4 1(Sertifikat Mutu)	TW 1 0 TW 2 0 TW 3 0 TW 4 1
									Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi	Meningkatnya Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi	Jumlah Sertifikat Produk/person/sertifikat inspeksi yang Diterbitkan	Sertifikat	TW 1 0 TW 2 0 TW 3 0 TW 4 1(Sertifikat Akreditasi)	TW 1 0 TW 2 0 TW 3 0 TW 4 1

No	Program	Indikator Kinerja Program	Target		REALISASI		Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target		REALISASI		Subkegiatan	Sasaran Subkegiatan	Indikator Kinerja Subkegiatan	Satuan	Target		Realisasi								
			TW 1	10%	TW 1	10			TW 1	1	TW 1	1					TW 1	1	TW 1	1	TW 1	1	TW 1	1	TW 1	1	
	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Produk Lokal yang Digunakan, Dipromosikan dan Dipasarkan Melalui Akses Pasar	TW 1	10%	TW 1	10	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas promosi Produk Dalam Negeri	TW 1	1	TW 1	1	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kepersertaan dan Partisipasi pada Pameran Produk Dalam Negeri	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepersertaan dan partisipasi pada pameran produk dalam negeri	UMKM	TW 1	1	TW 1	1							
			TW 2	20%	TW 2	20			TW 2	2	TW 2	1					TW 2	1									
			TW 3	30%	TW 3				TW 3	3 (1, 1 Tw2, 1 Tw1)	TW 3						TW 3	1	TW 3								
			TW 4	70%	TW 4				TW 4	6 (3, 1 Tw3, 1 Tw2, 1 Tw1)	TW 4						TW 4	3	TW 4								
								Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran Produk Dalam Negeri	TW 1	0	TW 1	0	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	UMKM	TW 1	0	TW 1	0						
								Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah laporan sosialisasi peningkatan produk dalam negeri	TW 1	0	TW 1	0	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Tersedianya Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri melalui Peningkatan Literasi Anak Didik, Generasi Muda dan Masyarakat Tentang Kecintaan dan Kebanggaan dalam Menggunakan Produk Dalam Negeri	Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Laporan	TW 1	0	TW 1	0						
										TW 2	0	TW 2	0					TW 2	0	TW 2	0						
										TW 3	1	TW 3						TW 3	1	TW 3							
										TW 4	1 (1 Tw3)	TW 4						TW 4	0	TW 4							
														Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah orang yang mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Orang	TW 1	0	TW 1	0						
														Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Tersedianya laporan kegiatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh masyarakat yang melibatkan stakeholder, tokoh masyarakat atau influencer	Jumlah laporan kegiatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh masyarakat yang melibatkan stakeholder, tokoh masyarakat atau influencer	Laporan	TW 2	0	TW 2	0						
																		TW 3	0	TW 3	0						
																		TW 4	2	TW 4							
																		TW 1	0	TW 1	0						
																		TW 2	0	TW 2	0						
																		TW 3	0	TW 3	0						
																		TW 4	1	TW 4							
				Fasilitasi Produk UMKM yang Dipasarkan (UPTD RPK)	TW 1	0	TW 1	0	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Jumlah UMKM yang terfasilitasi desain promosi dan atau media promosi (UPTD RPK)	TW 1	0	TW 1	0	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kepersertaan dan Partisipasi pada Pameran Produk Dalam Negeri	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepersertaan dan partisipasi pada pameran produk dalam negeri	UMKM	TW 1	0	TW 1	0					
																								TW 2	0	TW 2	0
																									TW 3	0	TW 3
																							TW 4	50%	TW 4		
							Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah UMKM yang terfasilitasi pemasaran (UPTD RPK)	TW 1	0	TW 1	0	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	UMKM	TW 1	0	TW 1	0							
									TW 2	0	TW 2	0					TW 2	0	TW 2	0							
									TW 3	0	TW 3	0					TW 3	0	TW 3	0							
									TW 4	0	TW 4	0					TW 4	0	TW 4	0							
							Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Laporan Pengembangan kelembagaan	TW 1	0	TW 1	0	Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Tersedianya laporan kegiatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh masyarakat yang melibatkan stakeholder, tokoh masyarakat atau influencer	Jumlah laporan kegiatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh masyarakat yang melibatkan stakeholder, tokoh masyarakat atau influencer	Laporan	TW 1	0	TW 1	0							
									TW 2	0	TW 2	0					TW 2	0	TW 2	0							
									TW 3	0	TW 3	0					TW 3	0	TW 3	0							
									TW 4	1 Laporan Tahunan	TW 4						TW 4	1	TW 4								

Anggaran Di hapus pada anggaran pergeseran 2025

No	Program	Indikator Kinerja Program	Target		REALISASI		Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target		REALISASI		Subkegiatan	Sasaran Subkegiatan	Indikator Kinerja Subkegiatan	Satuan	Target		Realisasi									
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Disperindag)	TW 1	0	TW 1	0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	TW 1	2 Dokumen	TW 1	2 (RAD, PK)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	TW 1	2 (RAD, PK)	TW 1	2 (RAD, PK)								
			TW 2	0	TW 2	0			TW 2	3 Dokumen (RAD, PK, Renja-P)	TW 2	3 Dokumen (RAD, PK, Renja P)					TW 2	3 (RAD, PK, Renja-P)										
			TW 3	0	TW 3	0			TW 3	6 Dokumen (RAD, PK, Renja-P, Renja, RKA, RKPA)	TW 3	6 (RAD, PK, Renja-P, Renja, RKA, RKPA)					TW 3	6 (RAD, PK, Renja-P, Renja, RKA, RKPA)										
			TW 4	77	TW 4	77			TW 4	11 Dokumen (RAD, PK, Renja-P, Renja, RKA, RKPA, PK-P, DPPA, Renstra, DPA, RKT)	TW 4	11 (RAD, PK, Renja-P, Renja, RKA, RKPA, PK-P, DPPA, Renstra, DPA, RKT)					TW 4	11 (RAD, PK, Renja-P, Renja, RKA, RKPA, PK-P, DPPA, Renstra, DPA, RKT)										
									Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah	TW 1	7 Laporan (Dalev TW4 2024, ESR, LKPJ, LPPD, CK, LAKIP, Data Sektoral)	TW 1					7 (Dalev TW4 2024, ESR, LKPJ, LPPD, CK, LAKIP, Data Sektoral)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	TW 1	7 (Dalev TW4 2024, ESR, LKPJ, LPPD, CK, LAKIP, Data Sektoral)	TW 1	7 (Dalev TW4 2024, ESR, LKPJ, LPPD, CK, LAKIP, Data Sektoral)					
										TW 2	8 Laporan (Dalev TW4 2024, ESR, LKPJ, LPPD, CK, LAKIP, Data Sektoral, Dalev TW1)	TW 2					8 (Dalev TW4 2024, ESR, LKPJ, LPPD, CK, LAKIP, Data Sektoral, Dalev TW1)			TW 2	8 (Dalev TW4 2024, ESR, LKPJ, LPPD, CK, LAKIP, Data Sektoral, Dalev TW1)	TW 2	8 (Dalev TW4 2024, ESR, LKPJ, LPPD, CK, LAKIP, Data Sektoral, Dalev TW1)					
										TW 3	9 Laporan (Dalev TW4 2024, ESR, LKPJ, LPPD, CK, LAKIP, Data Sektoral, Dalev TW1, Dalev TW2)	TW 3					9 (Dalev TW4 2024, ESR, LKPJ, LPPD, CK, LAKIP, Data Sektoral, Dalev TW1, Dalev TW2)			TW 3	9 (Dalev TW4 2024, ESR, LKPJ, LPPD, CK, LAKIP, Data Sektoral, Dalev TW1, Dalev TW2)	TW 3	9 (Dalev TW4 2024, ESR, LKPJ, LPPD, CK, LAKIP, Data Sektoral, Dalev TW1, Dalev TW2)					
										TW 4	10 Laporan (Dalev TW4 2024, ESR, LKPJ, LPPD, CK, LAKIP, Data Sektoral, Dalev TW1, Dalev TW2, Dalev TW3)	TW 4					10 (Dalev TW4 2024, ESR, LKPJ, LPPD, CK, LAKIP, Data Sektoral, Dalev TW1, Dalev TW2, Dalev TW3)			TW 4	10 (Dalev TW4 2024, ESR, LKPJ, LPPD, CK, LAKIP, Data Sektoral, Dalev TW1, Dalev TW2, Dalev TW3)	TW 4	10 (Dalev TW4 2024, ESR, LKPJ, LPPD, CK, LAKIP, Data Sektoral, Dalev TW1, Dalev TW2, Dalev TW3)					
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Survey kepuasan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	TW 1			0	TW 1	0	Jumlah Dokumen Keuangan PD					16 Dokumen (Pengajuan Gaji dan Tunjangan Bulan Jan s.d Maret + Bulan 14	TW 1	16 Dokumen (Pengajuan Gaji dan Tunjangan Bulan Jan s.d Maret + Bulan 14	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	TW 1	16 Dokumen (Pengajuan Gaji dan Tunjangan Bulan Jan s.d Maret + Bulan 14	TW 1	16 Dokumen (Pengajuan Gaji dan Tunjangan Bulan Jan s.d Maret + Bulan 14	
TW 2	0	TW 2				0	TW 2	32 Dokumen (Pengajuan Gaji dan Tunjangan Bulan April s.d Juni + Bulan 13 +TW1	TW 2	32 Dokumen (Pengajuan Gaji dan Tunjangan Bulan April s.d Juni + Bulan 13 +TW1	TW 2		32 Dokumen (Pengajuan Gaji dan Tunjangan Bulan April s.d Juni + Bulan 13 +TW1															
TW 3	0	TW 3				0	TW 3	44 Dokumen (Pengajuan Gaji dan Tunjangan Bulan Juli s.d September) + TW1, TW2	TW 3	44 Dokumen (Pengajuan Gaji dan Tunjangan Bulan Juli s.d September) + TW1, TW2	TW 3		44 Dokumen (Pengajuan Gaji dan Tunjangan Bulan Juli s.d September) + TW1, TW2															
TW 4	60	TW 4				60	TW 4	58 Dokumen (Pengajuan Gaji dan Tunjangan Bulan Oktober s.d Desember) + TW1, TW2, TW3	TW 4	58 Dokumen (Pengajuan Gaji dan Tunjangan Bulan Oktober s.d Desember) + TW1, TW2, TW3	TW 4		58 Dokumen (Pengajuan Gaji dan Tunjangan Bulan Oktober s.d Desember) + TW1, TW2, TW3															
							Jumlah Laporan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	TW 1	1 (LHP di Bulan Jan)	TW 1	1 (LHP di Bulan Jan)		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen		TW 1	1 (LHP di Bulan Jan)					TW 1	1 (LHP di Bulan Jan)			
								TW 2	1 (LHP di Bulan Jan)	TW 2	1 (LHP di Bulan Jan)							TW 2	1 (LHP di Bulan Jan)									
								TW 3	2 (LHP di Bulan Juli)	TW 3	2 (LHP di Bulan Juli)							TW 3	2 (LHP di Bulan Juli)									
								TW 4	2 (LHP Jan, Juli)	TW 4	2 (LHP Jan, Juli)							TW 4	2 (LHP Jan, Juli)									

No	Program	Indikator Kinerja Program	Target	REALISASI	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	REALISASI	SubKegiatan	Sasaran SubKegiatan	Indikator Kinerja SubKegiatan	Satuan	Target	Realisasi	
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	TW 1 150 SPJ TW 2 345 SPJ TW 3 545 SPJ TW 4 800 SPJ	TW 1 150 SPJ TW 2 345 SPJ TW 3 545 SPJ TW 4 800 SPJ						TW 1 150 SPJ TW 2 345 SPJ TW 3 545 SPJ TW 4 800 SPJ	TW 1 150 SPJ TW 2 345 SPJ TW 3 545 SPJ TW 4 800 SPJ
						Jumlah Laporan Keuangan	TW 1 4 (Lap. Realisasi Kew & Pendapatan Bulan Jan s.d Maret + CALK) TW 2 7 (Lap. Realisasi Kew & Pendapatan Bulan April s.d Juni) + TW1 TW 3 10 (Lap. Realisasi Kew & Pendapatan Bulan Juli s.d Sept) +TW1, TW2 TW 4 13 (Lap. Realisasi Kew & Pendapatan Bulan Okt s.d Des) + TW1, TW2, TW3	TW 1 4 (Lap. Realisasi Kew & Pendapatan Bulan Jan s.d Maret + CALK) TW 2 7 (Lap. Realisasi Kew & Pendapatan Bulan April s.d Juni) + TW1 TW 3 10 (Lap. Realisasi Kew & Pendapatan Bulan Juli s.d Sept) +TW1, TW2 TW 4 13 (Lap. Realisasi Kew & Pendapatan Bulan Okt s.d Des) + TW1, TW2, TW3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	TW 1 4 (Lap. Realisasi Kew & Pendapatan Bulan Jan s.d Maret + CALK) TW 2 7 (Lap. Realisasi Kew & Pendapatan Bulan April s.d Juni) + TW1 TW 3 10 (Lap. Realisasi Kew & Pendapatan Bulan Juli s.d Sept) +TW1, TW2 TW 4 13 (Lap. Realisasi Kew & Pendapatan Bulan Okt s.d Des) + TW1, TW2, TW3	TW 1 4 (Lap. Realisasi Kew & Pendapatan Bulan Jan s.d Maret + CALK) TW 2 7 (Lap. Realisasi Kew & Pendapatan Bulan April s.d Juni) + TW1 TW 3 10 (Lap. Realisasi Kew & Pendapatan Bulan Juli s.d Sept) +TW1, TW2 TW 4 13 (Lap. Realisasi Kew & Pendapatan Bulan Okt s.d Des) + TW1, TW2, TW3	
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Terinventarisasi	TW 1 1 Laporan (Rekon BMD) TW 2 1 Laporan (Rekon BMD Semester 1) TW 3 2 Laporan (Rekon BMD Semester 1, 2) TW 4 2 Laporan (Rekon BMD Semester 1, 2)	TW 1 1 Laporan (Rekon BMD) TW 2 1 Laporan (Rekon BMD Semester 1) TW 3 2 Laporan (Rekon BMD Semester 1, 2) TW 4 2 Laporan (Rekon BMD Semester 1, 2)	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	TW 1 0 TW 2 1 (Laporan BMD Semester 1) TW 3 0 TW 4 2 (Laporan BMD Semester 1, 2)/Tahunan	TW 1 0 TW 2 1 (Laporan BMD Semester 1) TW 3 0 TW 4 2 (Laporan BMD Semester 1, 2)/Tahunan	
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian PD	TW 1 0 TW 2 1 Laporan TW 3 0 TW 4 1 Laporan	TW 1 0 TW 2 1 Laporan TW 3 0 TW 4 1 Laporan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	TW 1 0 TW 2 0 TW 3 4 TW 4 4	TW 1 0 TW 2 0 TW 3 4 TW 4 4	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi Umum PD	TW 1 1 Laporan Tw TW 2 2 Laporan (Tw1, Tw2) TW 3 3 Laporan (Tw1, Tw2, Tw3) TW 4 4 Laporan (Tw1, Tw2, Tw3, Tw4)	TW 1 1 Laporan Tw TW 2 2 Laporan (Tw1, Tw2) TW 3 3 Laporan (Tw1, Tw2, Tw3) TW 4 4 Laporan (Tw1, Tw2, Tw3, Tw4)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	TW 1 1 TW 2 2 TW 3 3 TW 4 4	TW 1 1 TW 2 2 TW 3 3 TW 4 4	

No	Program	Indikator Kinerja Program	Target	REALISASI	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	REALISASI	SubKegiatan	Sasaran SubKegiatan	Indikator Kinerja SubKegiatan	Satuan	Target	Realisasi
									Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	TW 1 1 TW 2 2 TW 3 3 TW 4 4	TW 1 1 TW 2 2 TW 3 3 TW 4 4
									Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	TW 1 1 TW 2 2 TW 3 3 TW 4 4	TW 1 1 TW 2 2 TW 3 3 TW 4 4
									Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	TW 1 1 TW 2 2 TW 3 3 TW 4 4	TW 1 0 TW 2 2 TW 3 3 TW 4 4
									Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	TW 1 1 TW 2 2 TW 3 3 TW 4 4	TW 1 1 TW 2 2 TW 3 3 TW 4 4
									Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	TW 1 0 TW 2 0 TW 3 0 TW 4 1	TW 1 0 TW 2 0 TW 3 0 TW 4 1
									Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	TW 1 0 TW 2 0 TW 3 0 TW 4 1	TW 1 0 TW 2 0 TW 3 0 TW 4 1
						Jumlah Laporan Layanan Informasi dan Kehumasan PD	TW 1 0 TW 2 0 TW 3 0 TW 4 1 (Laporan Tahunan)	TW 1 0 TW 2 0 TW 3 0 TW 4 1					TW 1 0 TW 2 0 TW 3 0 TW 4 0	TW 1 0 TW 2 0 TW 3 0 TW 4 0
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	TW 1 0 TW 2 0 TW 3 0 TW 4 1 (Laporan Tahunan)	TW 1 0 TW 2 0 TW 3 0 TW 4 1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	TW 1 0 TW 2 8 TW 3 8 TW 4 8	TW 1 0 TW 2 0 TW 3 0 TW 4 0
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	TW 1 0 TW 2 0 TW 3 0 TW 4 1 (Laporan Tahunan)	TW 1 0 TW 2 0 TW 3 0 TW 4 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	TW 1 0 TW 2 0 TW 3 0 TW 4 1 (Laporan Tahunan)	TW 1 0 TW 2 0 TW 3 0 TW 4 1
									Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	TW 1 0 TW 2 0 TW 3 0 TW 4 1 (Laporan Tahunan)	TW 1 0 TW 2 0 TW 3 0 TW 4 1
									Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	TW 1 0 TW 2 0 TW 3 0 TW 4 1 (Laporan Tahunan)	TW 1 0 TW 2 0 TW 3 0 TW 4 1
									Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	TW 1 0 TW 2 0 TW 3 0 TW 4 1 (Laporan Tahunan)	TW 1 0 TW 2 0 TW 3 0 TW 4 1
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	TW 1 0 TW 2 0 TW 3 0 TW 4 1 (Laporan Tahunan)	TW 1 0 TW 2 0 TW 3 0 TW 4 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	TW 1 0 TW 2 0 TW 3 0 TW 4 1 (Laporan Tahunan)	TW 1 0 TW 2 0 TW 3 0 TW 4 1
									Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	TW 1 1 TW 2 4 TW 3 6 TW 4 7 (6 Laporan, 1 Tahunan)	TW 1 1 TW 2 4 TW 3 3 TW 4 7
									Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	TW 1 8 TW 2 23 TW 3 30 TW 4 37	TW 1 8 TW 2 23 TW 3 30 TW 4 37
									Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	TW 1 0 TW 2 1 TW 3 1 TW 4 1	TW 1 0 TW 2 0 TW 3 0 TW 4 1
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Kepuasan Pelayanan Teknis Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang		TW 1 0 TW 2 0 TW 3 0 TW 4 77	TW 1 0 TW 2 0 TW 3 0 TW 4 77	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian UPTD BPSMB	TW 1 0 TW 2 0 TW 3 0 TW 4 1	TW 1 0 TW 2 0 TW 3 0 TW 4 1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	TW 1 0 TW 2 0 TW 3 0 TW 4 1	TW 1 0 TW 2 0 TW 3 0 TW 4 1
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum UPTD BPSMB	TW 1 3 TW 2 6 TW 3 9 TW 4 12	TW 1 3 (Laporan) TW 2 6 TW 3 9 TW 4 12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	TW 1 0 TW 2 0 TW 3 0 TW 4 1	TW 1 0 TW 2 0 TW 3 0 TW 4 1
									Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	TW 1 0 TW 2 0 TW 3 1 TW 4 0	TW 1 0 TW 2 0 TW 3 0 TW 4 0
									Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	TW 1 0 TW 2 0 TW 3 0 TW 4 1	TW 1 0 TW 2 0 TW 3 0 TW 4 1

No	Program	Indikator Kinerja Program	Target	REALISASI	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	REALISASI	SubKegiatan	Sasaran SubKegiatan	Indikator Kinerja SubKegiatan	Satuan	Target	Realisasi
									Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	TW 1 0 TW 2 1 TW 3 0 TW 4 0	TW 1 0 TW 2 1 TW 3 0 TW 4 0
									Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	TW 1 3 (Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Januari-Maret 2025) TW 2 6 (Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan April-Juni 2025) TW 3 9 (Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Juli-September 2025) TW 4 12 (Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Oktober-Desember 2025)	TW 1 3 (Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Januari-Maret 2025) TW 2 6 (Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan April-Juni 2025) TW 3 9 (Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Juli-September 2025) TW 4 12 (Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Oktober-Desember 2025)
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPTD BPSMB	TW 1 0 TW 2 0 TW 3 0 TW 4 1	TW 1 0 TW 2 0 TW 3 0 TW 4 1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	TW 1 0 TW 2 0 TW 3 0 TW 4 1 (1 unit AC)	TW 1 0 TW 2 0 TW 3 0 TW 4 1
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPTD BPSMB	TW 1 3 TW 2 6 TW 3 9 TW 4 12	TW 1 3 (Laporan) TW 2 6 TW 3 9 TW 4 12	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	TW 1 3 (Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Januari-Maret 2025) TW 2 6 (Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan April-Juni 2025) TW 3 9 (Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Juli-September 2025) TW 4 12 (Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Oktober-Desember 2025)	TW 1 3 (Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Januari-Maret 2025) TW 2 6 (Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan April-Juni 2025) TW 3 9 (Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Juli-September 2025) TW 4 12 (Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Oktober-Desember 2025)
									Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	TW 1 3 (Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Januari-Maret 2025) TW 2 6 (Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan April-Juni 2025) TW 3 9 (Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Juli-September 2025) TW 4 12 (Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Oktober-Desember 2025)	TW 1 3 (Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Januari-Maret 2025) TW 2 6 (Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan April-Juni 2025) TW 3 9 (Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Juli-September 2025) TW 4 12 (Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Oktober-Desember 2025)
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPTD BPSMB	TW 1 3 TW 2 6 TW 3 9 TW 4 12	TW 1 3 (Laporan) TW 2 6 TW 3 9 TW 4 12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	TW 1 1 (1 unit mobil operasional yang dipelihara) TW 2 3 (3 unit mobil operasional yang dipelihara) TW 3 9 (9 unit mobil operasional yang dipelihara) TW 4 12 (12 unit mobil operasional yang dipelihara)	TW 1 0 TW 2 0 TW 3 0 TW 4 0
									Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	TW 1 3 (3 unit peralatan kantor yang dipelihara) TW 2 6 (6 unit peralatan kantor yang dipelihara) TW 3 9 (9 unit peralatan kantor yang dipelihara) TW 4 12 (12 unit peralatan kantor yang dipelihara)	TW 1 0 TW 2 6 (6 unit peralatan kantor yang dipelihara) TW 3 9 (9 unit peralatan kantor yang dipelihara) TW 4 12 (12 unit peralatan kantor yang dipelihara)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Kepuasan Pelayanan Teknis Rumah Promosi dan Kemasan	TW 1 0 TW 2 0 TW 3 0 TW 4 77	TW 1 0 TW 2 0 TW 3 0 TW 4 77	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan UPTD RPK	TW 1 3 Lap (Jan, Feb, Mei, Jun + TW I) TW 2 6 Lap (Apr, Mei, Jun + TW I) TW 3 9 Lap (Juli, Agustus, Sep + TW I + TW II) TW 4 12 Lap (Oktober, November, Desember + TW I + TW II + TW III)	TW 1 3 TW 2 6 TW 3 9 TW 4 12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	TW 1 3 Lap (Jan, Feb, Mar) TW 2 6 Lap (Apr, Mei, Jun + TW I) TW 3 9 Lap (Juli, Agustus, Sep + TW I + TW II) TW 4 12 Lap (Oktober, November, Desember + TW I + TW II + TW III)	TW 1 3 Lap (Jan, Feb, Mar) TW 2 6 Lap (Apr, Mei, Jun + TW I) TW 3 9 Lap (Juli, Agustus, Sep + TW I + TW II) TW 4 12 Lap (Oktober, November, Desember + TW I + TW II + TW III)
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian UPTD RPK	TW 1 1 Lap (TW I) TW 2 2 Lap (TW II + TW I) TW 3 3 Lap (TW III + TW II + TW I) TW 4 4 Lap (TW IV + TW III + TW II + TW I)	TW 1 1 TW 2 2 TW 3 3 TW 4 4	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	TW 1 0 TW 2 0 TW 3 0 TW 4 4 (Orang)	TW 1 0 TW 2 0 TW 3 0 TW 4 4
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum UPTD RPK	TW 1 1 Lap (TW I) TW 2 2 Lap (TW II + TW I) TW 3 3 Lap (TW III + TW II + TW I) TW 4 4 Lap (TW IV + TW III + TW II + TW I)	TW 1 1 TW 2 2 TW 3 3 TW 4 4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	TW 1 0 TW 2 2 Paket (Paket 1 + Paket 2) TW 3 3 (Paket 1 + Paket 2 + Paket 3) TW 4 4 (Paket 1 + Paket 2 + Paket 3 + Paket 4)	TW 1 0 TW 2 2 TW 3 3 TW 4 4

No	Program	Indikator Kinerja Program	Target	REALISASI	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	REALISASI	SubKegiatan	Sasaran SubKegiatan	Indikator Kinerja SubKegiatan	Satuan	Target	Realisasi
									Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	TW 1 0 TW 2 2 Paket (Paket 1 + Paket 2) TW 3 3 (Paket 1 + Paket 2 + Paket 3) TW 4 4 (Paket 1 + Paket 2 + Paket 3 + Paket 4)	TW 1 0 TW 2 2 Paket (Paket 1 + Paket 2) TW 3 3 TW 4 4
									Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	TW 1 0 TW 2 2 Paket (Paket 1 + Paket 2) TW 3 3 (Paket 1 + Paket 2 + Paket 3) TW 4 4 (Paket 1 + Paket 2 + Paket 3 + Paket 4)	TW 1 0 TW 2 2 Paket (Paket 1 + Paket 2) TW 3 3 TW 4 4
									Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	TW 1 0 TW 2 2 Paket (Paket 1 + Paket 2) TW 3 3 (Paket 1 + Paket 2 + Paket 3) TW 4 4 (Paket 1 + Paket 2 + Paket 3 + Paket 4)	TW 1 0 TW 2 2 Paket (Paket 1 + Paket 2) TW 3 3 TW 4 4
									Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	TW 1 0 TW 2 2 Paket (Paket 1 + Paket 2) TW 3 3 (Paket 1 + Paket 2 + Paket 3) TW 4 4 (Paket 1 + Paket 2 + Paket 3 + Paket 4)	TW 1 0 TW 2 2 Paket (Paket 1 + Paket 2) TW 3 3 TW 4 4
									Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	TW 1 0 TW 2 1 (Laporan) TW 3 1 (Laporan) TW 4 2 (Laporan)	TW 1 0 TW 2 1 (Laporan) TW 3 1 TW 4 2
									Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	TW 1 0 TW 2 1 (Laporan) TW 3 1 (Laporan) TW 4 2 (Laporan)	TW 1 0 TW 2 1 (Laporan) TW 3 1 TW 4 2
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah RPK	Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPTD RPK	TW 1 0 TW 2 0 TW 3 0 TW 4 1 Lap (Tahunan)	TW 1 0 TW 2 0 TW 3 0 TW 4 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	TW 1 0 TW 2 1 (Laporan) TW 3 1 (Laporan) TW 4 2 (Laporan)	TW 1 0 TW 2 1 (Laporan) TW 3 1 TW 4 2
									Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	TW 1 3 Lap (Jan, Feb, Mar) TW 2 6 Lap (Apr, Mei, Jun + TW I) TW 3 9 Lap (Juli, Agustus, Sep + TW I + TW II) TW 4 12 Lap (Oktober, November, Desember + TW I + TW II + TW III)	TW 1 3 Lap (Jan, Feb, Mar) TW 2 6 Lap (Apr, Mei, Jun + TW I) TW 3 9 TW 4 12

No	Program	Indikator Kinerja Program	Target	REALISASI		Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target		REALISASI		SubKegiatan	Sasaran SubKegiatan	Indikator Kinerja SubKegiatan	Satuan	Target		Realisasi	
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPTD RPK	TW 1	1	TW 1	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	TW 1	4 (Unit)	TW 1	5 (Unit)
							TW 2	1	TW 2		TW 2					6 (Unit)	TW 2	6 (Unit)	
							TW 3	1	TW 3		TW 3					8 (Unit)	TW 3	8 (Unit)	
							TW 4	1 Lap (Tahunan)	TW 4		TW 4					10 (Unit)	TW 4		

Keterangan :

1. Target TW 4 HARUS SAMA dengan Target tahun 2025
2. Target TW (es 2, 3 atw IV/Fungsional) terdiri dari 3 jenis uraian, yaitu dapat bersifat Proses, nominal atau kumulatif.
3. Bersifat proses yaitu Target TW 1,2, dan 3 disajikan bukan angka atau % melainkan **tahapan** untuk mencapai target akhir Tahun/TW IV. Namun pada TW IV harus ada angka nominalnya/terukur.
4. Bersifat nominal adalah target TW 1 = TW 2 = TW 3 = TW 4 (setiap TW adalah sama)
5. Bersifat kumulatif yaitu target TW 4 Adalah akumulatif dari semua TW/ semua TW tidak dibagi rata.
 - Target TW 2 adalah akumulatif dari Target TW 1 dan Target TW 2,
 - Target TW 3 adalah akumulatif dari Target TW 1, Target TW 2 dan Target TW 3
 - Target TW 4 adalah akumulatif dari Target TW 1, Target TW 2 dan Target TW 3



Kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,
Sadan Pengembangan dan Pembinaan Usaha, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan,
memeritikan

Piagam Penghargaan

0027.3/81.257/Per/Kepting/2025

terpilih

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

karena telah berupaya meningkatkan penggunaan barang-barang
di ruang publik dan oleh instansi lembaga.



Kepala,
M. Muhammad Ihsan, S.S., M.Hum.
NIP. 197402152000321002